



PEMERINTAHAN KOTA DUMAI
DINAS KESEHATAN
Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar
DUMAI



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKj-IP)
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2022**



Dinas Kesehatan
Kota Dumai



Jl. Tuanku Tambusai
Bagan Besar, Dumai



Dinkes.dumai.kota.go.id



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS KESEHATAN

Jl. Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar – Kode Pos 28882
DUMAI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Syaiful, M.K.M
NIP : 197107242001121004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV c
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-IP) ini adalah benar berdasarkan data un audit per tanggal 10 Januari 2023 yang bersumber pada:

1. Laporan kinerja Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Dumai
2. Laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai
3. Laporan kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
4. Laporan kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Dumai
5. Laporan kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
6. Laporan kinerja UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai
7. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022
8. Badan Pusat Statistik Tahun 2022 didownload melalui website <https://bps.go.id> pada tanggal 2 Januari 2023

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI

dr. SYAIFUL, M.K.M
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 197107242001121004

KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 telah mengamanatkan seluruh OPD di lingkungan Instansi Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) kepada Kepala Daerah. LKj-IP dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate serta berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2022 berarti Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menyelesaikan kegiatannya dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2022, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kinerja tahun 2022 telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai kepada Pemerintah Kota Dumai, DPRD dan masyarakat.

Akhir kata, diharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dumai, 10 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai



Dr. SYAIFUL, M.K.M
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 197107242001121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan kreativitas dan produktivitas serta mampu bersaing dan berkiprah menuju masyarakat yang madani, maka kesehatan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Dumai Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu. Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai pelaksana sebagaimana tugas Pemerintah Kota Dumai dalam bidang kesehatan telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian misi kedua Pemerintah Kota Dumai yakni mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022, dapat dilihat program-program yang telah dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kota Dumai, peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian-pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2022. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Dumai telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terlihat dari pencapaian sasaran maupun pengukuran kinerja yang telah ditetapkan yaitu tercapainya (1). Angka Kematian Bayi sebesar 9.96/1.000 KH, (2). Angka Kematian Balita 11.13/1.000 KH, (3). Angka Kematian Ibu 58.56/100.000 KH, (4). Umur Harapan Hidup 71.25 tahun, (5). Angka Kesakitan Malaria: API = 0,02/1.000 penduduk, (6). Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ 47.07%, (7). Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko 0.16%, (8). Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) 56.64/100.000, (9). Persentase balita dengan gizi buruk 0,12, (10). Persentase balita dengan gizi kurang 0,69%, dan (11). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai 95.80%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Maksud Dan Tujuan	2
c. Isu Strategis.....	3
d. Struktur Organisasi.....	14
e. Dasar Hukum.....	17
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 20
a. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program untuk Pencapaian Sasaran, Rencana Kinerja tahun 2022.....	20
b. Perjanjian Kinerja	28
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 30
a. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	31
b. Realisasi Anggaran	64
 BAB IV PENUTUP.....	 76

Lampiran

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.	35
Grafik 3.2 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022	36
Grafik 3.3 Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.	37
Grafik 3.4 Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022	37
Grafik 3.5 Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2022.....	38
Grafik 3.6 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.....	39
Grafik 3.7 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2022.	39
Grafik 3.8 Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d Tahun 2022.	40
Grafik 3.9 Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.	41
Grafik 3.10 Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.....	42
Grafik 3.11 Jumlah kasus TB Paru BTA + Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.....	43
Grafik 3.12 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.	44
Grafik 3.13 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2022.....	45

Grafik 3.14 Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2022.....	46
Grafik 3.15 Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.	47
Grafik 3.16 Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.	48
Grafik 3.17 Jumlah Kasus Balita Dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan Kota di Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.....	49
Grafik 3.18 Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.....	50
Grafik 3.19 Jumlah Kasus Balita Dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan Kota di Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.....	51
Grafik 3.20 Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.....	53
Grafik 3.21 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022.....	56

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 s/d 2026.....	24
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 s/d 2026	25
Tabel 2.4 Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Target Tahun 2022	27
Tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2026	32
Tabel 3.6 Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022	33
Tabel 3.7 Umur Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Propinsi Riau dan Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2022.....	40
Tabel 3.8 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai dari tahun 2020-2022.....	56
Tabel 3.9 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022.....	65
Tabel 3.10 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022.....	68
Tabel 3.11 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Uraian UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022	70
Tabel 3.12 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Sumber Anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022	71

Tabel 3.13 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Instansi/Unit Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022	72
Tabel 3.14 Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022	73
Tabel 3.15 Daftar Nama Penghargaan Pada Bidang Kesehatan Yang Diterima Kota Dumai Dari Tahun 2021s/d 2022.	74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai 16



B A B I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan kreativitas dan produktivitas serta mampu bersaing dan berkiprah menuju masyarakat yang madani, maka kesehatan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengatur bahwa semua instansi pemerintah diamanatkan untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan telah menyusun suatu rencana strategis bidang kesehatan sebagai kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di bidang kesehatan. Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka akuntabilitas kinerja periode tahunan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RKT dan sejalan dengan Renstra, guna memberikan masukan dan

umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di sektor kesehatan di Kota Dumai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Walikota Dumai, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKj-IP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj-IP oleh setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 merupakan suatu media pertanggungjawaban yang memuat informasi mengenai evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program-program kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2022.

b. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Dumai dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai periode 2021-2026. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan kesehatan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai selama tahun anggaran 2022.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Dumai khususnya urusan kesehatan pada tahun 2022.
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Dumai khususnya urusan kesehatan di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Dumai khususnya urusan kesehatan dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Isu Strategis

Pandemi COVID 19 masih merupakan isu strategis utama pelaksanaan pembangunan yang berlanjut sampai saat ini sejak kemunculannya pada awal tahun 2020 dan telah merubah semua asumsi-asumsi pembangunan. COVID 19 ini telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid 19 menjadi tantangan dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menyusun rencana pembangunan daerah termasuk pembangunan kesehatan. Pandemi COVID 19 merupakan ancaman kesehatan masyarakat yang harus dipergunakan

sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.

COVID 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), yang diketahui pertama kali terjangkit di daerah Wuhan – China pada bulan Desember 2019. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *MERS (Middle East Respiratory Syndrome)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Sedangkan Novel coronavirus (2019nCoV) atau COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Penyebaran Corona Virus Diseases (COVID) 19 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu termasuk di Indonesia. Kasus terkonfirmasi positif COVID 19 pertama kali diumumkan di Indonesia oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Kedua kasus tersebut merupakan warga Depok yang tertular Covid 19 setelah kontak dengan seorang warga Negara Jepang tinggal di Malaysia yang kemudian dinyatakan meninggal dengan positif Covid 19. COVID 19 ini telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. COVID 19 telah dinyatakan sebagai pandemik oleh WHO dan Pemerintah Indonesia telah menetapkannya Infeksi COVID-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam pada tanggal 15 Maret 2020. Lebih lanjut melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 telah ditetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 19 (COVID) 19 di Indonesia.

Kasus terkonfirmasi positif COVID 19 pertama kali diumumkan di Provinsi Riau pada tanggal 18 Maret 2020 sebanyak 1 kasus. Pasien positif COVID 19 tersebut mempunyai riwayat perjalanan ke Malaysia dan mengeluh sakit setelah pulang dari Malaysia, dimana kasus positif COVID

19 sudah ditemukan di Negara tersebut. Sementara Kota Dumai mengkonfirmasi kasus positif COVID 19 pertama kali pada tanggal 22 Maret 2020 sebanyak 1 kasus. Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 259/BPBD/2021 tanggal tanggal 19 Maret 2021, maka status Kota Dumai dinyatakan Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Pandemi Corona Virus 19 di Kota Dumai oleh Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinas Kesehatan, 2022) selama tahun 2020, dan 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID 19 yang ditemukan di Kota Dumai berdasarkan hasil pemeriksaan SWAB PCR sebanyak 10.324 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 259 kasus (Attack Rate 2.51%). Sedangkan jumlah kesembuhan pasien terkonfirmasi COVID 19 sebanyak 10.064 orang atau sebesar 97.48%. Selama tahun 2020 dan 2021 perkembangan kasus baru terkonfirmasi positif COVID 19 di Kota Dumai berfluktuasi. Berfluktuasinya kasus COVID 19 di Kota Dumai salah satu penyebabnya adalah tidak dipatuhinya protokol kesehatan oleh masyarakat Kota Dumai seperti tidak menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah, tidak melakukan physical atau social distancing dan tidak melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) misalnya mencuci tangan pakai sabun, olahraga rutin, konsumsi makanan seimbang dengan buah dan sayur serta istirahat yang cukup

Berdasarkan tempat, selama tahun 2020 dan 2021 kasus terkonfirmasi positif COVID 19 banyak ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 3.051 kasus atau sebesar 29.55%, disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 2.310 kasus atau sebesar 22.37%. Hal tersebut kemungkinan disebabkan tingginya mobilitas masyarakat termasuk perjalanan luar daerah termasuk ke pulau jawa di 2 kecamatan tersebut dimana warga pendatang (tidak memiliki dokumen kependudukan Kota Dumai) banyak berdomisili di 2 kecamatan tersebut. Kecamatan dengan jumlah terendah penemuan kasus terkonfirmasi positif COVID 19 adalah Kecamatan Medang Kampai yakni sebanyak 363 kasus atau sebesar 3.52%

Pada tahun 2022 perkembangan kasus COVID 19 mulai melandai, meskipun sempat mengalami peningkatan kasus yang signifikan pada bulan

Februari (552 kasus) dan Maret (608 kasus) pada tahun 2022. Dari 1.285 kasus terkonfirmasi positif COVID 19, sebanyak 1.252 orang dinyatakan sembuh dengan angka kesembuhan (RR) sebesar 97.43% dan sebanyak 33 orang dinyatakan meninggal dengan angka kematian (CFR) sebesar 2.57%. Pada umumnya pasien konfirmasi yang meninggal dengan disertai komorbid (penyakit penyerta) atau penyakit komplikasi.

Berdasarkan kecamatan, kasus konfirmasi COVID 19 terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 404 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 309 kasus dan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 214 kasus. Dari hasil pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic COVID 19, pencapaian vaksinasi COVID 19 dosis 1 pada tahun 2022 sebesar 27.82% atau sebanyak 88.319 orang dari 317.414 penduduk sasaran. Sedangkan pencapaian vaksinasi COVID 19 dosis 2 pada tahun 2022 sebesar 23% atau sebanyak 72.514 orang dari 317.414 penduduk sasaran.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi bahwa dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID 19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat dan menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah Indonesia, maka terhitung tanggal 30 Desember 2022 PPKM dinyatakan dihentikan. Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID 19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemic dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir, dengan langkah-langkah sebagai berikut: tetap melaksanakan protocol kesehatan COVID 19, tetap melaksanakan surveilans dan tetap melaksanakan vaksinasi COVID 19. Untuk itu, dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta keikutsertaan pihak swasta/BUMN dan masyarakat.

Prinsip dasar pembangunan kesehatan yang tercantum dalam Undang–Undang Dasar 1945, juga telah disebutkan dengan jelas dalam Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, antara lain menyebutkan bahwa semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dengan baik dan hidup layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Kesehatan juga merupakan salah satu investasi dalam pembangunan. Dimana pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan perlu diatur dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai dengan amanat perubahan Undang–Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan Undang–Undang Dasar 1945 dan terbitnya Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu, salah satunya melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kinerja dan penampilan puskesmas perlu terus ditingkatkan yang salah satunya melalui

peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

Pada tahun 2022 pencapaian Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita mengalami peningkatan meskipun angkanya masih di bawah target Kota Dumai. Namun, pencapaian Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dan angkanya telah berada di bawah target Kota Dumai dan target Nasional. Penyebab utama kematian bayi sangat erat kaitannya dengan permasalahan selama masa kehamilan, pada saat persalinan, serta perawatan bayi baru lahir terutama pada usia satu bulan pertama kehidupan. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Penyebab lain kematian neonatal, bayi dan balita di Kota Dumai adalah infeksi khususnya pneumonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat. Masih adanya kasus kematian Ibu, kondisi ini kemungkinan disebabkan antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu di Kota Dumai yaitu Perdarahan, Hipertensi/preeklamsi dan Gangguan Sistem Peredaran Darah. Kematian ibu pada umumnya banyak terjadi pada kelompok ibu nifas dan pada kelompok umur 20-35 tahun. Mayoritas kasus kematian ibu merupakan rujukan kasus maternal resti dan komplikasi dari praktek bidan swasta dan bidan desa ke RSUD Kota Dumai. Penyebab kematian ibu ini dapat diminimalisir apabila kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua > 35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun). Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke seluruh wilayah Kota Dumai, namun kompetensi masih belum memadai. Puskesmas perawatan yang ada belum merupakan puskesmas PONED, sedangkan

Rumah Sakit PONEK sudah ada yakni RSUD Kota Dumai. Namun kualitas pelayanan di RSUD Kota Dumai belum optimal karena terbatasnya kuantitas dan kualitas/kompetensi serta terbatasnya kapasitas tempat tidur ruang kebidanan sehingga tidak semua rujukan kasus maternal resti dan komplikasi dapat ditangani. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit. Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien yang berasal dari Kota Dumai namun juga pasien yang berasal dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau dan juga dari luar Provinsi Riau.

Permasalahan status gizi balita menjadi salah satu perhatian serius baik secara Global dan Nasional dalam komitmen kebijakan **Sustainable Development Goals (SDG's)**. Dalam rangka percepatan pencapaian **Sustainable Development Goals (SDG's)** sebagai kelanjutan Millenium Development Goals (MDG's) yang telah berakhir pada tahun 2015 terutama tujuan **kedua** yakni **Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Gizi, serta Mendorong Pertanian yang Berkelanjutan** yang salah satu indikator kinerjanya adalah menurunnya prevalensi balita gizi kurang (*underweight*) dan balita kurus (*wasting*) dan prevalensi balita pendek (*stunting*). Perkembangan masalah gizi semakin kompleks saat ini, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani dengan serius. Perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi balita gizi kurang (*underweight*) dan prevalensi balita pendek (*stunting*). *Stunting* terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi

stunting, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global (*SUN-Scaling Up Nutrition*) dalam menurunkan *stunting*, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah *stunting* secara terintergrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peningkatan prevalensi obesitas tidak hanya terjadi pada usia balita, namun juga terjadi di usia dewasa. Mencermati hal tersebut, pendidikan gizi seimbang yang proaktif serta PHBS menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di masyarakat. Sasaran peningkatan status gizi masyarakat di fokuskan pada bayi, balita, remaja putri, ibu hamil dan menyusui serta lansia.

Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, dan demam berdarah. Penyakit Demam Berdarah (DBD) dan Malaria masih merupakan penyakit endemis di Kota Dumai. Pada tahun 2022 kasus malaria dan DBD mengalami peningkatan kasus. Bahkan kasus malaria yang umumnya sering ditemukan di Kecamatan Sungai Sembilan, saat ini sudah ditemukan juga di Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Selatan. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah dan malaria sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, namun kasus DBD dan Malaria belum bisa ditekan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi dan $\pm 80\%$ penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan fogging yang cukup dan layak. Saat ini peralatan fogging yang tersedia jumlahnya

terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan. Disamping itu penyakit *neglected diseases* seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak. Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15-59 meningkat. Selama satu dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai sedang mengalami *double burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gastritis, dan penyakit jantung. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2022, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Mellitus, Asma, Kecelakaan, Stroke, Hipertensi dan kanker. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular.

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019 dan Tahun 2020 di Propinsi Riau, pada komiditi,

rata-rata konsumsi atau pengeluaran per kapita seminggu untuk rokok dan tembakau menempati urutan ke dua tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah. Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/II/2011 tentang Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, Nomor 7 Tahun 2011

namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukkan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang

nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik. Sementara itu, mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin, boraks dan bahan pewarna berbahaya.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2022 adalah 328.378 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 2,17% per tahun berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Jumlah wanita usia subur juga diperkirakan akan meningkat pada tahun berikutnya. Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada hampir 9.000 ibu hamil setiap tahun. Angka ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan neonatus/bayi. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2022 pemerintah baik Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 193.631 orang miskin dan mendekati miskin. Belum lagi dengan adanya pandemic COVID 19 penduduk yang

sebelumnya menjadi peserta BPJS secara mandiri, karena kehilangan mata pencahariannya menjadi tidak mampu membayar iuran bulanan BPJS yang mengakibatkan banyak peserta BPJS Mandiri (PBPU) menunggak.

d. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Dinas Kesehatan dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai, bahwa Dinas Kesehatan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

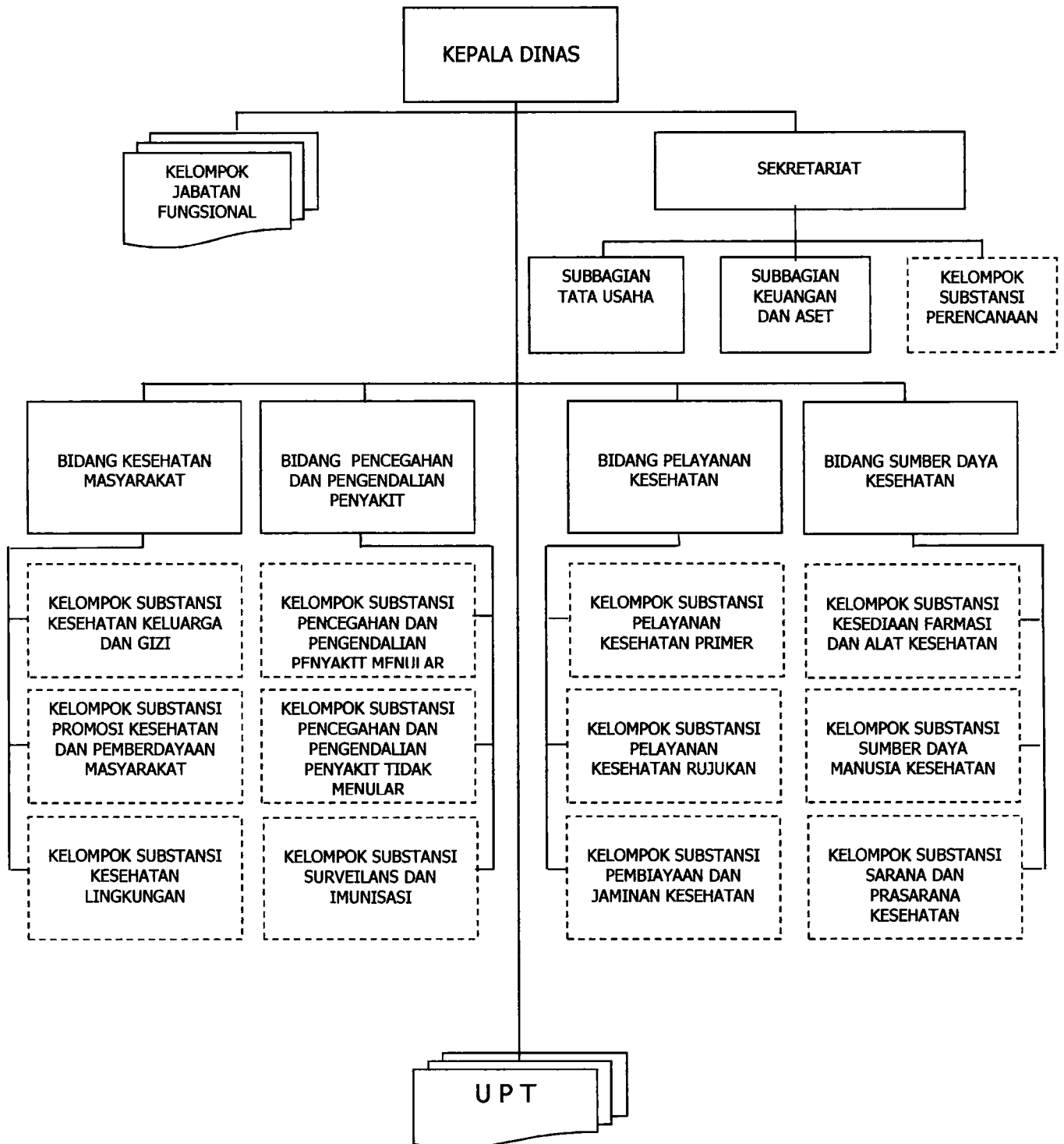
1. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset

- c. Kelompok Substansi Perencanaan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga Dan Gizi
 - b. Kelompok Substansi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
 - a. Kelompok Substansi Surveilans Dan Imunisasi
 - b. Kelompok Substansi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Kelompok Substansi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Kelompok Substansi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a. Kelompok Substansi Ketersediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
 - b. Kelompok Substansi Sarana Dan Prasarana Kesehatan
 - c. Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A
 - b. UPT Instalasi Farmasi Kelas A
 - c. UPT Puskesmas
 - d. UPT RSUD Kota Dumai
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai



Sampai dengan Desember 2022, jumlah PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai sebanyak 508 orang yang tersebar di Dinas Kesehatan Kota Dumai sebanyak 44 orang dan sebanyak 464 orang tersebar di 12 UPT yakni: 1) Instalasi Farmasi Kelas A sebanyak 5 orang, 2) Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebanyak 8 orang, 3) Puskesmas Dumai Kota sebanyak 55 orang, 4) Puskesmas Dumai Barat sebanyak 46 orang, 5) Puskesmas Jaya Mukti sebanyak 54 orang, 6) Puskesmas Bumi Ayu sebanyak 44 orang, 7) Puskesmas Bukit Timah sebanyak 39 orang, 8) Puskesmas Purnama 37 orang, 9) Puskesmas Sungai Sembilan sebanyak 55 orang, 10) Puskesmas Medang Kampai sebanyak 37 orang, 11) Puskesmas Bukit Kapur sebanyak 46 orang dan 12) Puskesmas Bukit Kayu Kapur sebanyak 38 orang. Dari total 508 PNS tersebut, berdasarkan golongan terbanyak adalah PNS golongan III sebanyak 326 orang atau sebesar 64.17%, disusul dengan PNS golongan II sebanyak 146 orang atau sebesar 28.74%. Sedangkan jumlah PNS golongan IV sebanyak 36 orang atau sebesar 7.09%.


e. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 2 Seri A Noreg .48.A/2022)
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)

15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai;
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E)
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 2 Seri D)
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 16 Seri B)
19. Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 per 29 Agustus 2022



B A B II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

a. Rencana Strategis

Visi

Visi Walikota/Wakil Walikota Dumai :

“ Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu “

maka Dinas Kesehatan Kota Dumai menyusun Rencana Strategis untuk merealisasikan hal tersebut diatas melalui Misi yang lebih spesifik di bidang kesehatan.

Misi

Misi Pemerintah Kota Dumai yang berkaitan dengan bidang kesehatan yakni **Misi Kedua :**

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu“

Terkait dengan Visi dan Misi tersebut Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan

Tujuan pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai misi 2 mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu adalah membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya

saing dan sejahtera, dengan sasaran terkait kesehatan adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai”**. Sasaran pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 terkait kesehatan tersebut menjadi tujuan pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yakni **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai”**

Sasaran

Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Strategi

Strategi pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai sasaran 1 meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kesehatan adalah: 1) meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar; 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, 3) Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar, 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan. Sedangkan strategi pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai sasaran 2 meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah:

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

2. Penyediaan layanan kesehatan menggunakan siklus hidup (continuum of care)
3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya
6. Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC)

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	2. Penyediaan layanan kesehatan menggunakan siklus hidup (continuum of care) 3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan

		3. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan	5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya
	2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	5. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat	6. Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2022 maka dirumuskan Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
Kota Dumai Tahun 2022 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai		Indeks Kesehatan	0.785	0.786	0.786	0.787	0.788	
		1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.10 tahun	71.15 tahun	71.20 tahun	71.25 tahun	71.25 tahun
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	92.2%	92.4%	92.6%	92.8%	92.8%

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Ada 11 indikator yang ditetapkan sebagai indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kesehatan yang harus dicapai mulai tahun 2022 s/d 2026 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai
Tahun 2022 s/d 2026

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	100	100	100	100
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	18	17.5	17	16.5	16
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	25	24.5	24	23.5	23
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	102	101.5	101	100.5	100
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,04	71.10	71.15	71.20	71.25
		2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	100	100	100	100
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	1	0.9	0.8	0.7	0.6
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	88	88	88	88
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	55	55	54	54
		3 Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	100	100
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	1	1	1	1
		3.2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	3	3	2	2
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92	92.2	92.4	92.6	92.8

Program Untuk Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai pada tahun 2026 serta memperhatikan pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kota Dumai, maka dalam periode 2021-2026 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas pembangunan bidang kesehatan Kota Dumai yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 per 29 Agustus 2022, terdiri dari 5 program, 23 kegiatan dan 111 sub kegiatan dengan perincian: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan; dan Program Urusan Wajib terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan. Uraian program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Rencana Kinerja Tahun 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021–2026, Rencana Kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja

untuk tahun 2022. Dalam rangka terwujudnya komitmen penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah.

Tabel 2.4
Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Target Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.	Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100
		1.1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17.5
		1.2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24.5
		1.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101.5
		1.4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,10
		2.	Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100
		2.1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.9
		2.2	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		2.3	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1
		2.4	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55
		3.	Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
		3.1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1
		3.2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92.2

b. Perjanjian Kinerja



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

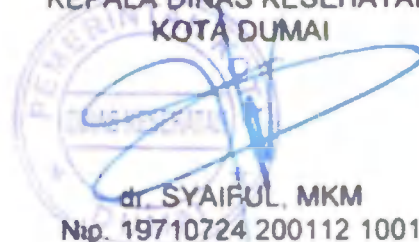
Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI


dr. SYAIFUL, MKM
Ntp. 19710724 200112 1001

Pihak Kedua,
WALIKOTA DUMAI


H. PAISAL, SKM, MARS


Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAMUN 2022
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Basaran	satuan	Target Tahunan 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785
		1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,10
		1.1 Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	17,5
		1.2 Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	24,5
		1.3 Angka Kematian Ibu	Per 1.000 Kelahiran Hidup	101,5
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,10
		1.6 Angka Kesakitan Melana (AP1)	Per 1.000 Penduduk	0,9
		1.7 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA *	%	68
		1.8 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	<1
		1.9 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 Penduduk	55
		1.10 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	1
1.11 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3		
2	Meningkatkan Petyayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	2 Cakupan Jemuran Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92,2

1	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	63.879.413,182
		2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	71.583.400
2	Sasaran 2 Meningkatnya petyayanan kesehatan bagi masyarakat	3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp	970.681,481
		4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	279.808.000
Jumlah			Rp.	68.201.487,063





BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari:

Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing indikator dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka pencapaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut (Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004) :

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Nilai dibawah 55	kurang
2.	Nilai ≥ 55 s/d < 70	cukup
3.	Nilai ≥ 70 s/d < 86	baik
4.	Nilai ≥ 86 s/d < 100	sangat baik
5.	Nilai ≥ 100	memuaskan

a. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Pada tahun 2022, pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan adalah sebesar 0.771. Bila dibandingkan dengan target Indeks Kesehatan pada tahun 2022 yakni sebesar 0.785, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 98.22% yang berarti pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai sangat baik. Bila dibandingkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan pada tahun 2021 yakni sebesar 0.77, maka terlihat pencapaian Indeks Kesehatan pada tahun 2022 statis. Bila dibandingkan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan pada tahun 2021 yakni sebesar 97.47%, maka terlihat ada sedikit peningkatan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan pada tahun 2022 (98.22%).

Pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), terlihat pencapaian AHH Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar 71,25 tahun. Bila dibandingkan dengan target AHH Kota Dumai pada tahun 2022 yakni sebesar 71,10 tahun, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat memuaskan. Bila dibandingkan dengan AHH pada tahun 2021 yakni sebesar 70,98, maka terlihat ada peningkatan pencapaian AHH Kota Dumai pada tahun 2022. Lebih lanjut, bila dibandingkan persentase capaian AHH pada tahun 2021 yakni sebesar 99,92%, maka terlihat ada sedikit peningkatan persentase capaian kinerja AHH pada tahun 2022 (100%).

Sedangkan untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terlihat pencapaian Cakupan JKN pada tahun 2022 sebesar 95.80%. Bila dibandingkan dengan target Cakupan JKN pada tahun 2022 yakni sebesar 92.2%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat memuaskan. Bila dibandingkan dengan Cakupan JKN pada tahun 2021 yakni sebesar 87.55%, maka terlihat ada peningkatan pencapaian Cakupan JKN pada tahun 2022. Demikian juga bila dibandingkan persentase capaian Cakupan JKN pada tahun 2021 yakni sebesar 95.16%, maka terlihat ada peningkatan persentase capaian kinerja Cakupan JKN pada tahun 2022 (100%).

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kota Dumai 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Indikator Kinerja					
					2021			2022		
					Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan			0.79	0.77	97.47	0.785	0.771	98.22
			1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04	70.98	99.92	71.10	71.25	100.00
			2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Dumai	92	87.55	95.16	92.2	95.8	100.00

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran IKU menggunakan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana dimuat dalam Bab II.b

Tabel 3.6
Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja	Kategori Nilai	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	100	100	Memuaskan
		1.1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17.5	9.96	100	Memuaskan
		1.2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24.5	11.13	100	Memuaskan
		1.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101.5	58.56	100	Memuaskan
		1.4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,10	71.25	100	Memuaskan
		2	Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	86.02	86.02	Sangat Baik
		2.1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.9	0.02	100	Memuaskan
		2.2	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	41.42	47.07	Kurang
		2.3	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0.16	100	Memuaskan
		2.4	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	56.64	97.02	Sangat Baik
		3	Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	Memuaskan
		3.1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0.12	100	Memuaskan
		3.2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	0.69	100	Memuaskan
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92.2	95.80	100	Memuaskan

Berdasarkan data di atas, secara umum Dinas kesehatan cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 ini. Dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), ada sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya memuaskan (tercapai 100%), dan sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya sangat baik. Namun, masih ada sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya kurang yakni Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya kurang tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai mengingat dampak pasca pandemik COVID 19 masih ada anggapan di masyarakat bahwa mereka takut tertular COVID 19 bila berobat ke fasilitas kesehatan. Masyarakat baru berobat ke fasilitas kesehatan ketika kondisi sakitnya sudah parah sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis yang berdampak pada kematian. Disamping itu, potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, sebagai daerah transit baik dalam negeri maupun luar negeri, tingginya kepadatan penduduk di daerah perkotaan serta tingginya mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota. Kondisi tersebut berpengaruh pada penyebaran penyakit Tuberkulosis yang berdampak pada tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tersebut.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Dumai cukup berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 94.92% (kategori nilai sangat baik). Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan tahun 2021 yakni sebesar 83.31% (kategori nilai baik), maka terlihat ada peningkatan pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan tahun 2022.

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

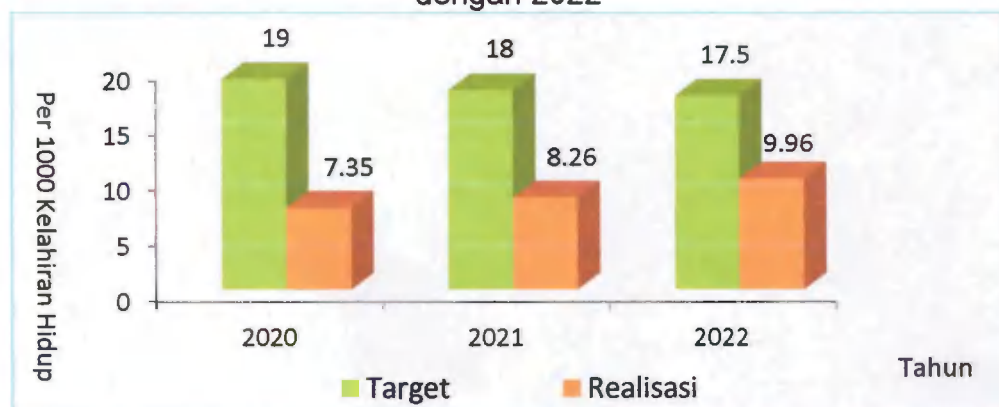
1.1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)

Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 85 kasus dari 8.538 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 9.96 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 17.5 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

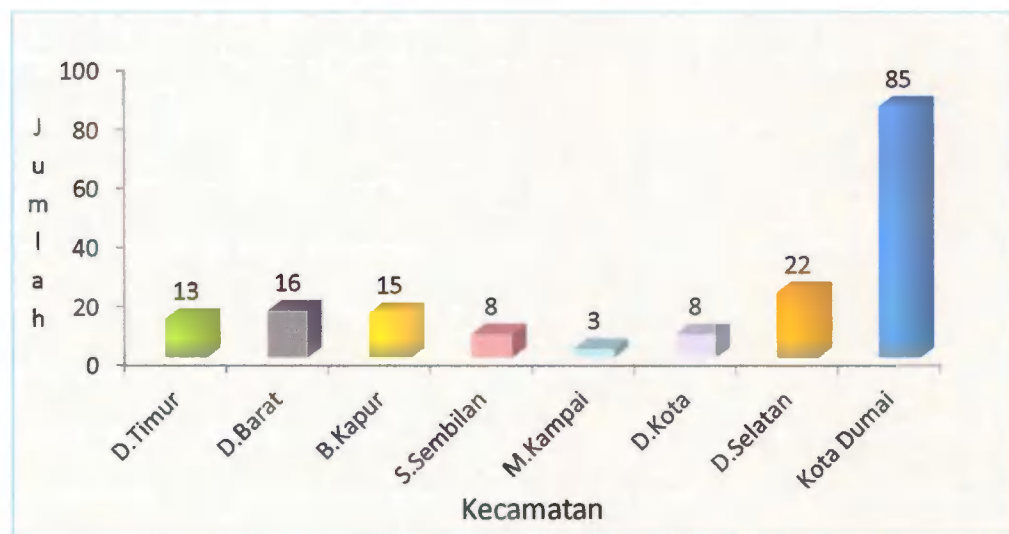
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dimana angka kematian bayi sebesar 8.26 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2022 yakni 17.5 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Demikian juga bila dibandingkan dengan target Provinsi Riau sebesar 00.00 per 1.000 kelahiran hidup dan target Nasional sebesar 18.6 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target Provinsi Riau dan Target Nasional. Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 3.1 berikut ini :

Grafik 3.1
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan yakni sebanyak 22 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 16 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.2 berikut ini :

Grafik 3.2
Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai tahun 2022



Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia

Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 95 kasus dari 8.538 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2022 di Kota Dumai sebesar 11.13 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 24.5 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dimana angka kematian balita sebesar 9.82 per 1000 kelahiran hidup, maka angka tersebut mengalami peningkatan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan

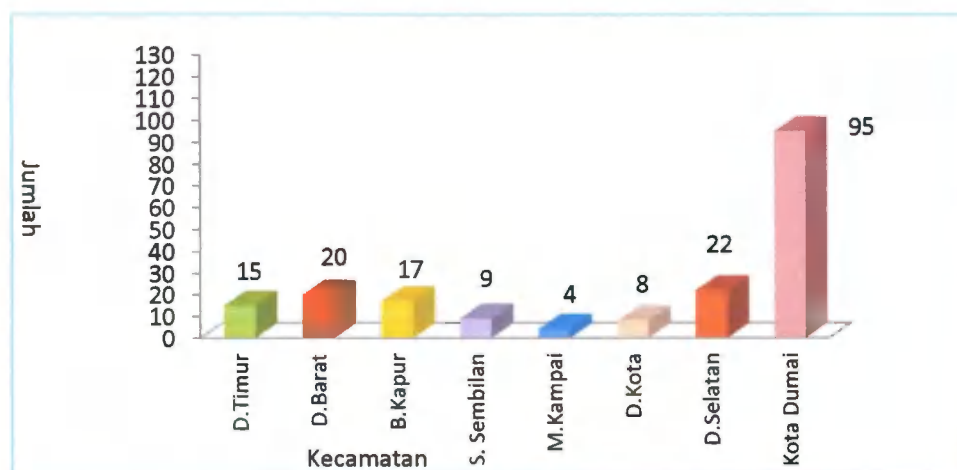
target indikator Kota Dumai tahun 2022 yakni 24.5 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 3.3 berikut ini :

Grafik 3.3
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2022



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 22 kasus dan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 20 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.4 berikut ini :

Grafik 3.4
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2022



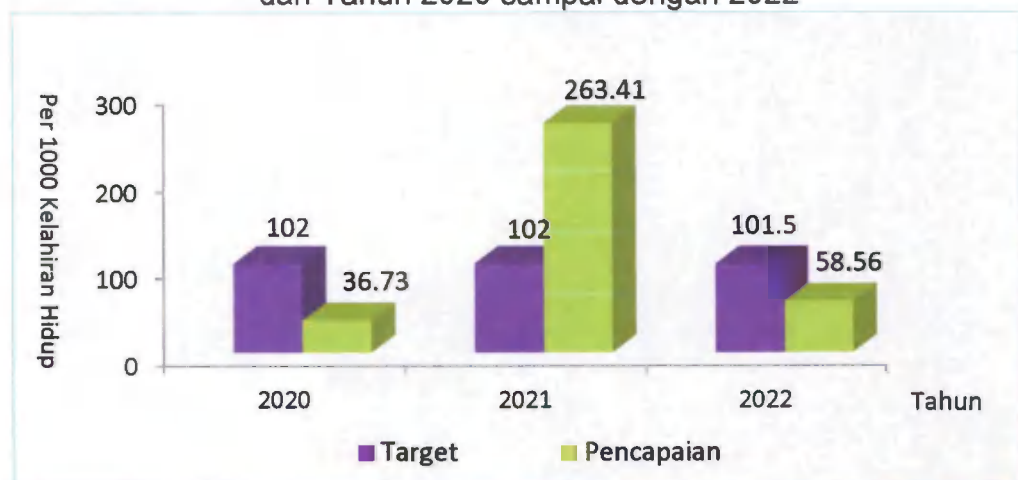
Penyebab kematian balita masih didominasi oleh BBLR dan Asfiksia.

Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 5 kasus dari 8.538 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2022 di Kota Dumai sebesar 58.56 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 101.5 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100 (memuaskan).

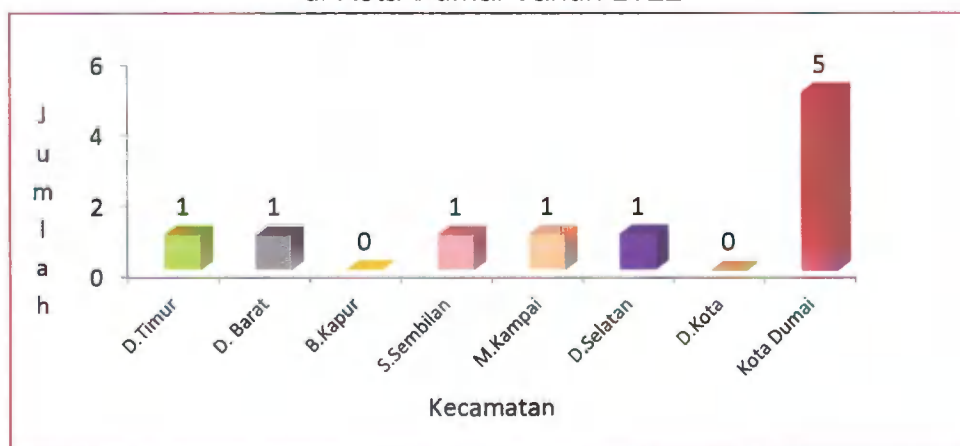
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021, di mana angka kematian ibu sebesar 263.41 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat adanya penurunan angka kematian ibu pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2022 yakni 101.5 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Demikian juga bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 205 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu di Kota Dumai berada di atas Target Nasional. Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan fluktuasi, dimana sempat menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 namun kembali menurun pada tahun 2022 seperti terlihat grafik 3.5 berikut ini :

Grafik 3.5
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2022



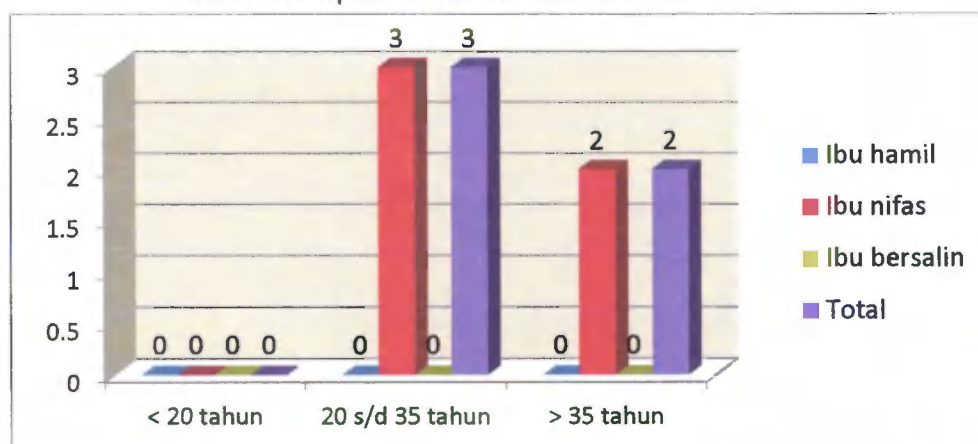
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu merata di 5 kecamatan yakni kecamatan Dumai Timur, kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Selatan, masing-masing sebanyak 1 kasus seperti terlihat pada grafik 3.6 berikut ini :

Grafik 3.6
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022



Penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan sebanyak 3 kasus, gangguan system peredaran darah (gangguan jantung) sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 3 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian ibu seluruhnya terjadi pada kelompok ibu nifas sebanyak 5 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini :

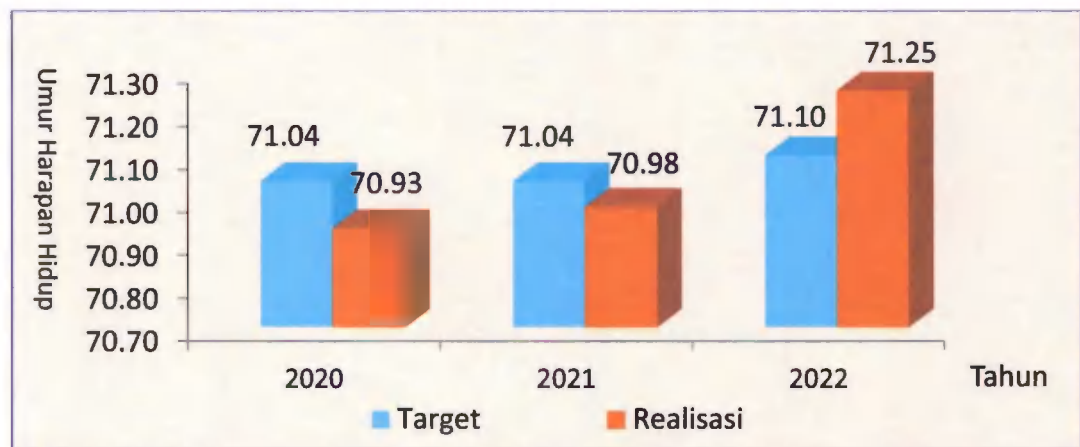
Grafik 3.7
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2022



Umur Harapan Hidup

Target kinerja Umur Harapan Hidup Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 71,10 tahun, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau untuk Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 71,25 tahun. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan). Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada grafik 3.8 berikut ini :

Grafik 3.8
Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2022



Tabel 3.7
Umur Harapan Hidup (UHH)
di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2022

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2020	71,47	71,60	70,93
2.	2021	71,57	71,67	70,98
3.	2022	71,85	71,95	71,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2022

Bila dibandingkan dengan pencapaian Umur Harapan Hidup Provinsi Riau pada tahun 2022 yakni sebesar 71,95 dan pencapaian Umur Harapan Hidup Indonesia pada tahun 2022 yakni sebesar 71,85, terlihat capaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai masih di bawah angka Provinsi Riau dan angka Nasional.

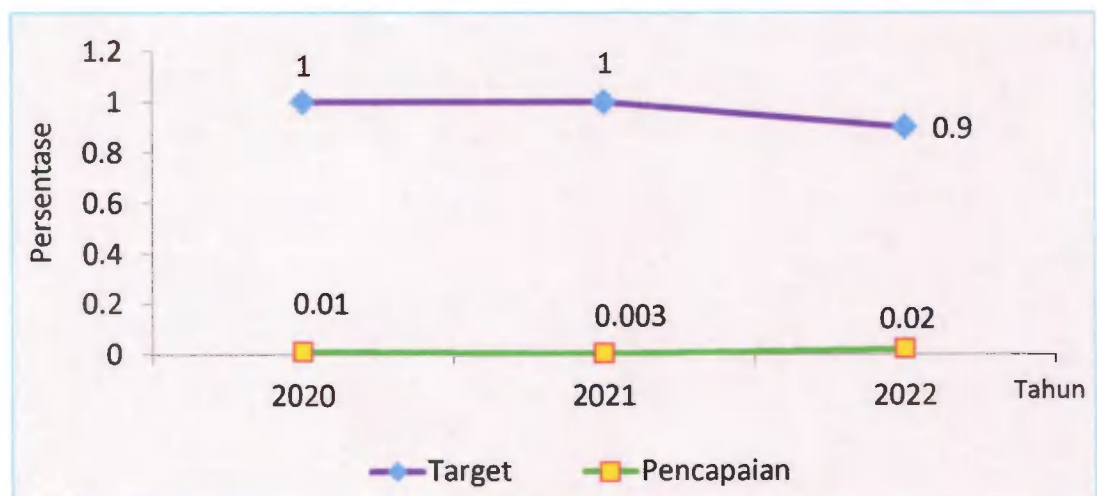
1.2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 180 kasus kesakitan. Dari 180 kasus yang ada terdapat 7 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar per 1.000 penduduk. Target kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (*Annual Parasite Incidence*) Kota Dumai pada tahun 2021 adalah sebesar 1 per 1.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

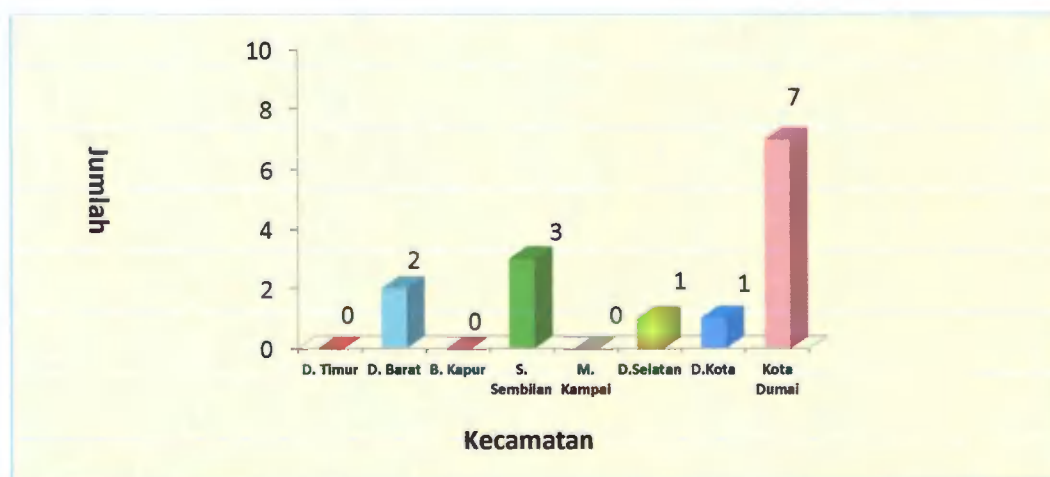
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,003 per 1.000 penduduk, maka angka *Annual Parasite Incidence* (API) tersebut mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2022 yakni 0.9 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 berfluktuasi seperti terlihat pada grafik 3.9 dibawah ini :

Grafik 3.9
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2022



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif ditemukan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Kota sebanyak 1 kasus, Kecamatan Dumai Barat sebanyak 2 kasus, Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 1 kasus dan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 3 kasus seperti terlihat pada grafik 3.10 berikut ini:

Grafik 3.10
Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2022



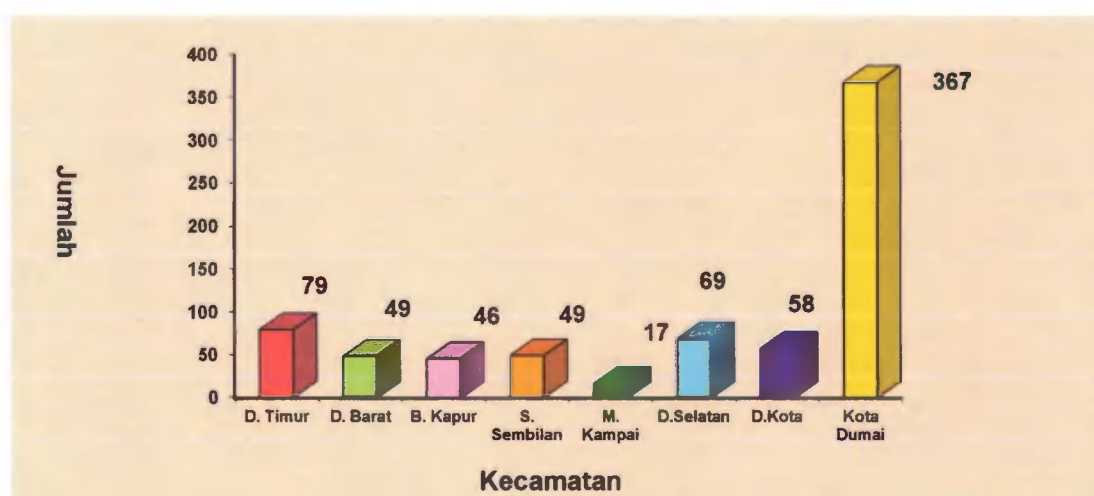
Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2022 dari total 367 penderita TB Paru BTA+ yang ditemukan (12-15 bulan yang lalu) dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, hasil evaluasi pengobatan menunjukkan sebanyak 152 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ adalah sebesar 41.42%. Target kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 88%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 47.07% (kurang). Rendahnya pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ pada tahun 2022 diduga penderita TB Paru BTA + tersebut tidak mau datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa ulang dahaknya karena takut didiagnosa COVID 19. Hal tersebut mengakibatkan pemantauan pengobatan terhadap pasien yang positif TB dan sudah berobat tidak dilakukan. Pasien mengambil obat diwakilkan oleh PMO atau keluarga, sehingga petugas TB puskesmas tidak bias melakukan follow up langsung kepada pasien sementara kontak

serumah tidak bisa dilakukan petugas TB puskesmas. Pemantauan pengobatan pasien hanya dilakukan melalui PMO atau keluarga yang mengambil obat atau menelpon langsung ke pasien. Selain itu pot sputum bulan ke 2, 5 dan akhir pengobatan yang dititipkan kepada PMO sering tidak dikembalikan dengan alasan tidak ada dahak. Dari sebanyak 215 pasien TB Paru BTA+ yang dinyatakan belum sembuh, sebanyak 181 orang atau sebesar 49,32% tetap melakukan pengobatan hingga akhir pengobatan dengan status pengobatan lengkap, sebanyak 1 orang atau sebesar 0.27% dinyatakan gagal, sebanyak 12 orang atau sebesar 3.27% meninggal dunia, sebanyak 20 orang atau sebesar 5.45% Lost Follow Up (LFU) dan sebanyak 1 orang atau sebesar sebesar 0.27% pindah domisili.

Berdasarkan kecamatan, kasus TB Paru BTA+ banyak terjadi di Kecamatan Dumai Timur (79 kasus) disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan (69 kasus) dan Kecamatan Dumai Kota (58 kasus), seperti terlihat pada grafik 3.11 berikut ini :

Grafik 3.11
Jumlah Kasus TB Paru BTA+ Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2022

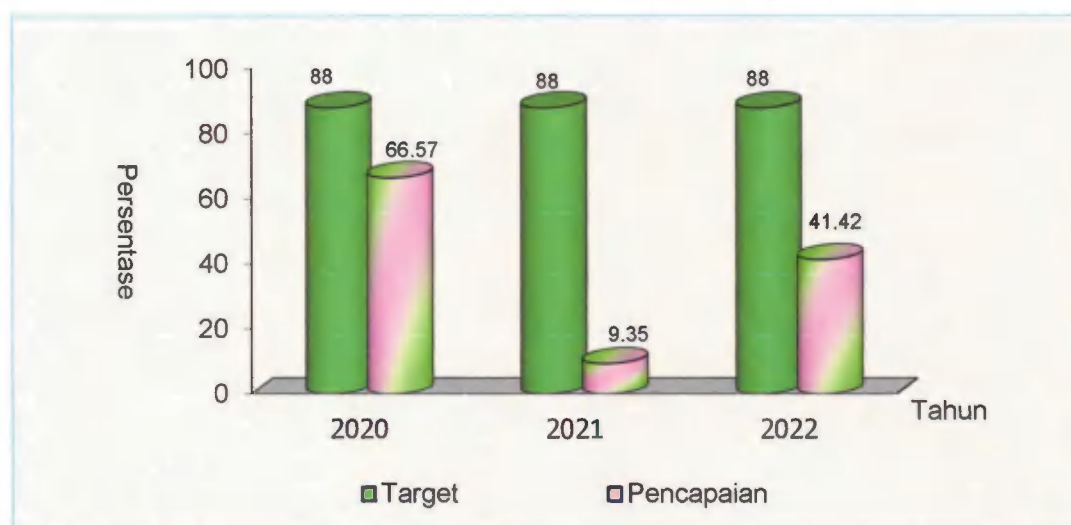


Tingginya kasus TB Paru BTA+ di 3 (tiga) kecamatan tersebut disebabkan ke tiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan padat penduduk yang memudahkan penularan penyakit TB Paru BTA+.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 sebesar 9.35%, maka terlihat ada peningkatan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka

pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ tahun 2022 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan fluktuasi seperti terlihat pada grafik 3.12 berikut ini :

Grafik 3.12
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2022



Adanya peningkatan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 karena kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.

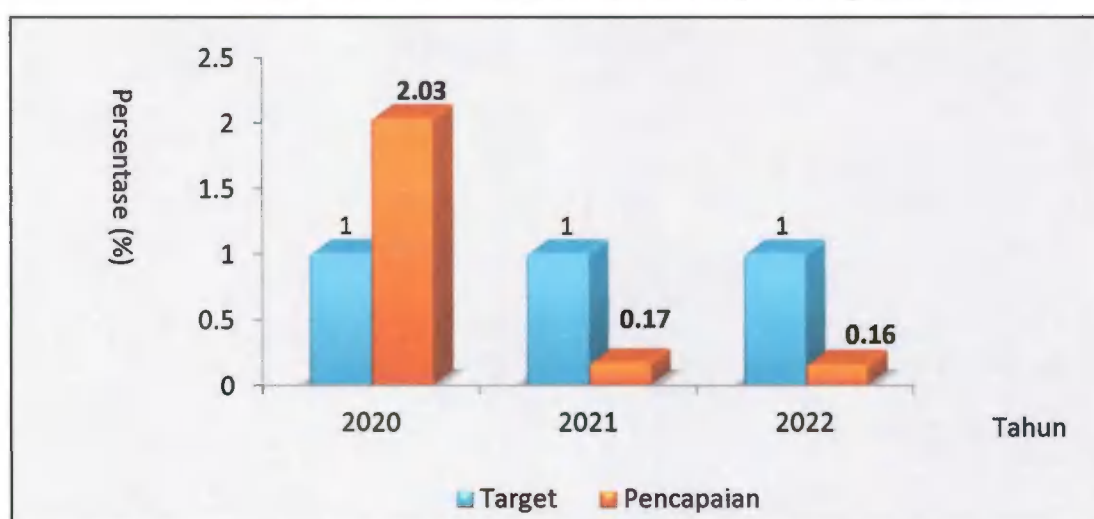
Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 547 kasus yang terdiri dari 516 kasus lama dan 31 kasus baru yang ditemukan tahun 2022. Dari 547 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 121 kasus, Lost Follow Up (LFU) sebanyak 98 kasus (hilang kontak) dan sebanyak 8 kasus berhenti minum obat ARV, sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 320 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko (sasaran kelompok usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 204.974 orang) pada tahun 2022 adalah sebesar 0.16%. Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota

Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

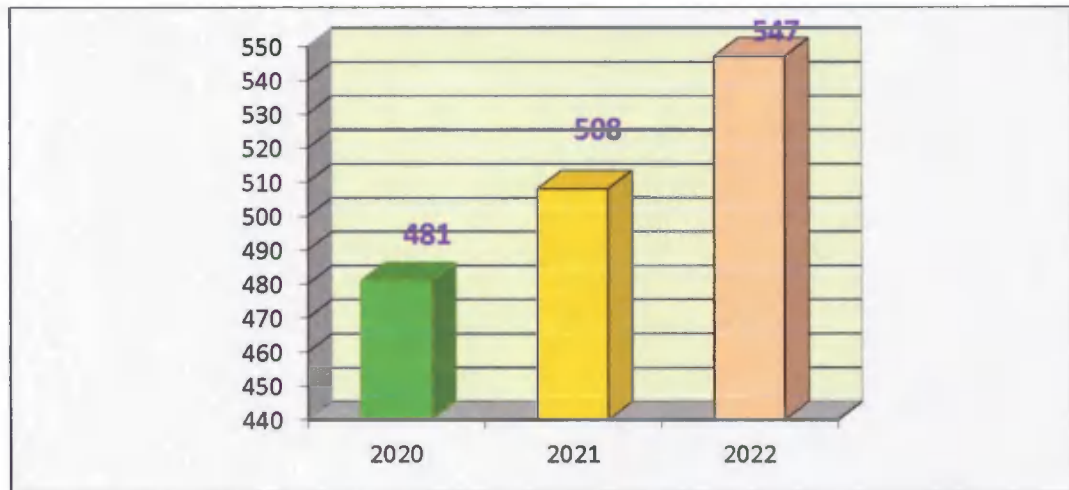
Pencapaian Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai mengalami penurunan seperti terlihat pada grafik 3.13 berikut ini :

Grafik 3.13
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2022



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0.17%, maka terlihat ada sedikit penurunan angka prevalensi pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2022 sebesar <1%, maka pencapaian tersebut masih dibawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai. Meskipun pencapaian angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko Kota Dumai rendah, hal tersebut perlu tetap diwaspadai karena kasus HIV merupakan fenomena gunung es.

Grafik 3.14
Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai
Dari Tahun 2020 s/d 2022



Pada tahun 2022 pencapaian angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di Kota Dumai sebesar 0.10 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dimana angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di Kota Dumai sebesar 0.08 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka terlihat ada peningkatan angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2022 sebesar 0.13 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

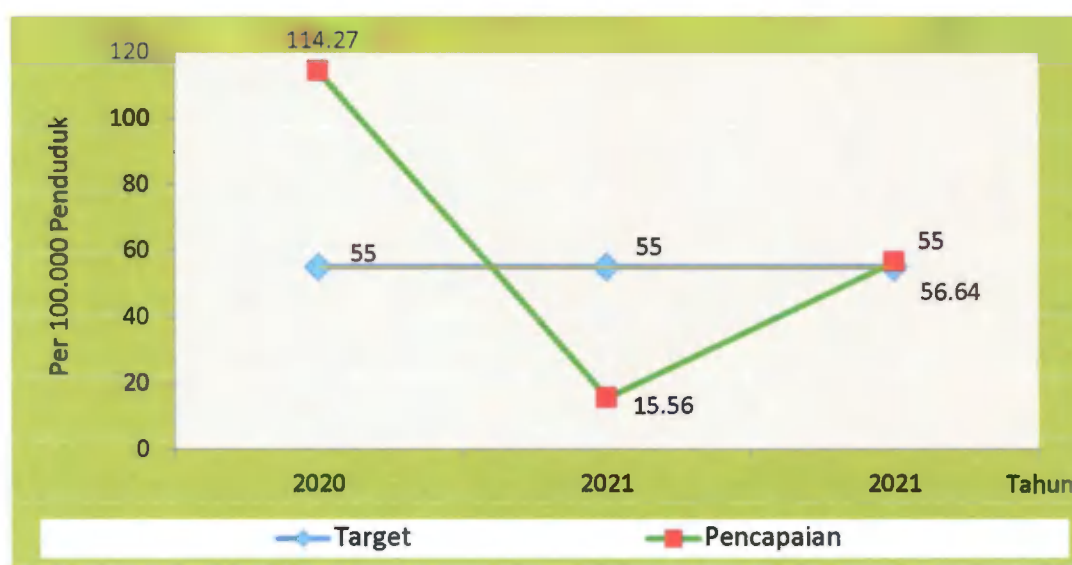
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2022 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 186 kasus atau IR = 56.64 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 0 orang atau CFR = 0%. Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 55 per 100.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 97.02% (sangat baik).

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 50 kasus atau IR = 15.56 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 1 orang atau CFR = 2 %, maka ada peningkatan angka kesakitan

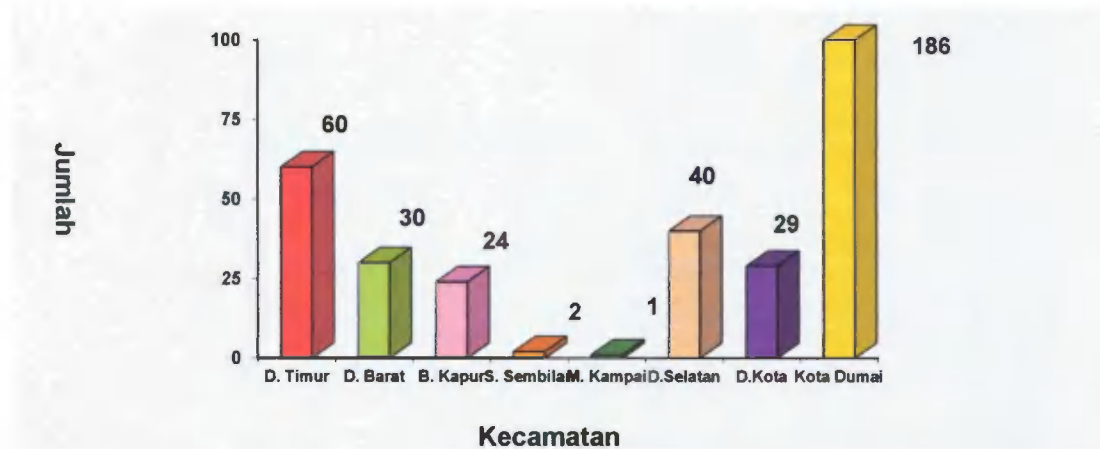
Demam Berdarah Dengue. Masih ditemukannya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti $\pm 80\%$ penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Pencapaian angka kesakitan DBD Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan fluktuasi seperti terlihat pada grafik 3.15 berikut ini

Grafik 3.15
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2022



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 60 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 40 kasus dan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 30 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.16 berikut ini :

Grafik 3.16
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2022



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M² dan dilakukan di 250 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/ pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

1.3 Meningkatkan Status Gizi Balita

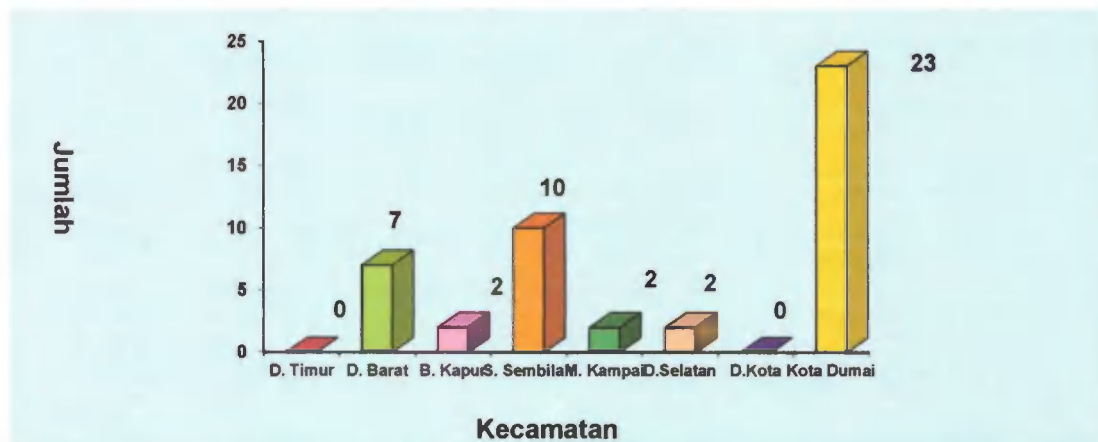
Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi

pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Pada tahun 2022 ditemukan kasus balita dengan gizi buruk sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus dari 19.381 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah sebesar 0,12%. Berdasarkan kecamatan, kasus balita dengan gizi buruk terbanyak ditemukan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 10 kasus disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 7 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.17 berikut ini :

Grafik 3.17
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2022



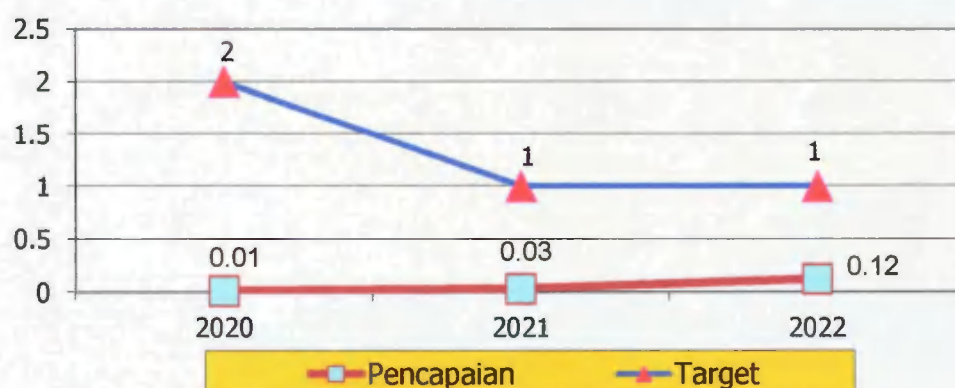
Meningkatnya jumlah kasus balita gizi buruk sebagai dampak pandemi COVID 19, dimana kegiatan penimbangan balita di posyandu belum berjalan secara optimal sehingga pemantauan status gizi balita setiap bulannya belum optimal juga. Disamping itu, masih ada ibu-ibu yang tidak mau membawa balitanya ke posyandu ataupun ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan karena takut tertular COVID 19. Hal tersebut terlihat dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah balita ditimbang sebanyak 2.806 orang atau sebesar 12,65% dari 22.287 balita pada tahun

2021 menjadi 19.381 balita pada tahun 2022. Di samping itu berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk, maka banyak terjaring kasus balita dengan gizi buruk.

Terhadap 23 (dua puluh tiga) kasus gizi buruk tersebut telah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu bubuk formula 100 kkal/100 ml atau 150 gram per hari dan biskuit selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling serta penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya. Dari 23 balita gizi buruk yang diintervensi sampai akhir tahun 2022, tinggal sebanyak 10 balita yang masih berstatus gizi buruk karena balita tersebut juga menderita penyakit penyerta. Agar status gizi balita tersebut dapat ditingkatkan menjadi gizi baik, maka penyakit penyertanya harus disembuhkan terlebih dahulu.

Bila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 6 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2022 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan). Pencapaian persentase balita dengan gizi buruk Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi buruk mengalami fluktuasi seperti terlihat pada grafik 3.18 berikut ini

Grafik 3.18
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022

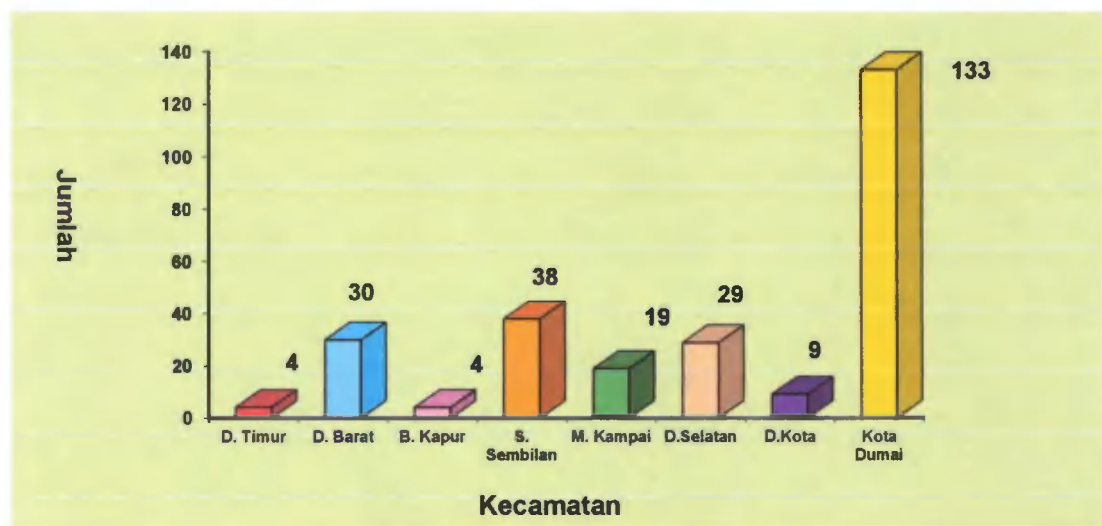


Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya.

Pada tahun 2022 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang (BGM) sebanyak 133 kasus dari 19.381 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang (BGM) di Kota Dumai adalah sebesar 0,69%. Berdasarkan kecamatan, kasus balita dengan gizi kurang terbanyak ditemukan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 38 kasus disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 30 kasus, dan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 29 kasus seperti terlihat pada grafik 3.19 berikut ini :

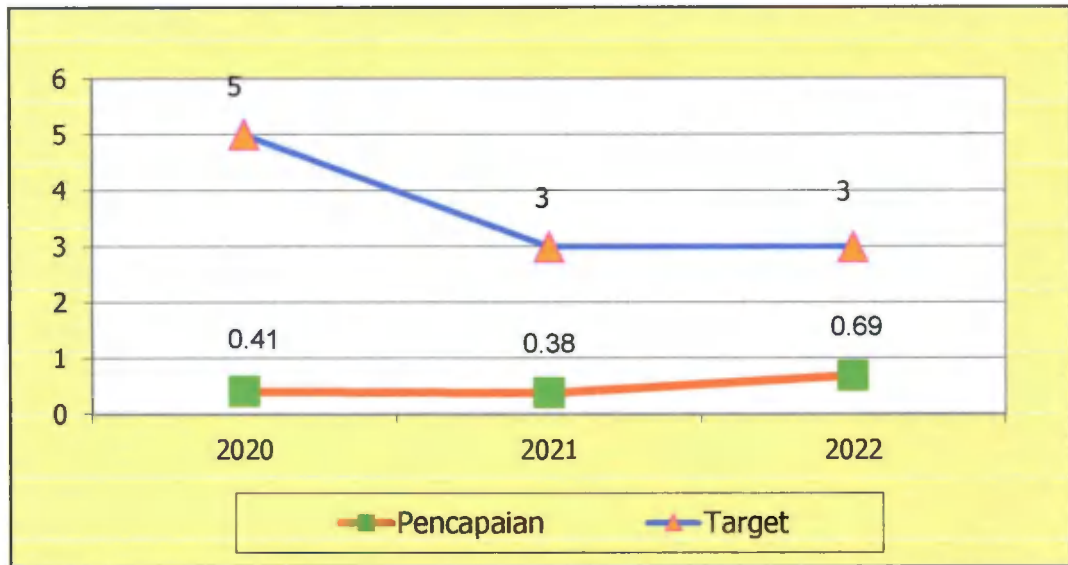
Grafik 3.19
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2022



Meningkatnya jumlah kasus balita gizi kurang sebagai dampak pandemi COVID 19, dimana kegiatan penimbangan balita di posyandu belum berjalan secara optimal sehingga pemantauan status gizi balita setiap bulannya belum optimal juga. Disamping itu, masih ada ibu-ibu yang tidak mau membawa balitanya ke posyandu ataupun ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan karena takut tertular COVID 19. Hal tersebut terlihat dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah balita ditimbang sebanyak 2.806 orang atau sebesar 12.65% dari 22.287 balita pada tahun 2021 menjadi 19.381 balita pada tahun 2022. Di samping itu berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi kurang, maka banyak terjaring kasus balita dengan gizi kurang.

Terhadap balita gizi kurang tersebut dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu bubuk formula 100 kkal/100 ml atau 150 gram per hari dan biskuit selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita. Dari 133 balita gizi kurang yang diintervensi sampai akhir tahun 2022, tinggal sebanyak 80 balita yang masih berstatus gizi kurang. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 85 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,38%, terlihat ada peningkatan kasus balita dengan gizi kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2022 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan). Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi kurang berfluktuasi seperti terlihat pada grafik 3.20 berikut ini:

Grafik 3.20
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang
Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022



Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di puskesmas (sebagai dampak pandemik COVID 19, kegiatan pemantauan pertumbuhan balita yang biasa dilakukan di posyandu dialihkan ke puskesmas) terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi.

Perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satu kondisi gizi kurang yang menjadi issue strategis baik Global, Nasional maupun Provinsi adalah balita pendek atau stunting. Berdasarkan data e-PPGBM per Februari 2022 diperoleh status gizi balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kota Dumai sebanyak 92 orang dari 19.381 balita yang ditimbang (prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 0.47%). Setelah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu bubuk formula 100 kkal/100 ml atau 150 gram per hari dan biskuit selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, maka berdasarkan data e-PPGBM per Desember 2022 diperoleh

status gizi balita stunting di Kota Dumai sebanyak 185 orang dari 19.381 balita yang ditimbang, terdiri dari balita pendek sebanyak 118 balita (63.78%) dan balita sangat pendek sebanyak 67 balita (36.22%). Dengan demikian prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kota Dumai adalah sebesar 0,95%. Bila dibandingkan dengan data e-PPGBM per Desember tahun 2021 dimana kasus balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kota Dumai sebanyak 82 kasus dengan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 0,37%, terlihat ada peningkatan kasus balita stunting (pendek dan sangat pendek) pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2022 yakni sebesar 9%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target Kota Dumai. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

Ada beberapa faktor penyebab kasus balita gizi kurang antara lain karena pola makan balita yang salah, ketidaktepatan pola asuh, faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi terhadap kemampuan membeli pangan keluarga, serta adanya penyakit penyerta yang diderita balita. Dengan demikian dalam upaya mencapai target penurunan persentase gizi kurang tersebut, perlu adanya penanganan intensif terhadap permasalahan gizi kurang yang ada di Kota Dumai. Selain itu, untuk menekan agar potensi terjadinya kasus balita dengan gizi kurang tidak menjadi lebih besar tetap perlu diperlukan upaya- upaya yang strategis. Upaya yang sudah dilaksanakan adalah dengan pemberian makanan tambahan, konseling dan pengobatan di puskesmas, serta perawatan di Kota Dumai.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

2.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain merupakan salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai, indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional juga merupakan salah satu indikator "Sustainable Development Goal's" (SDG's). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta

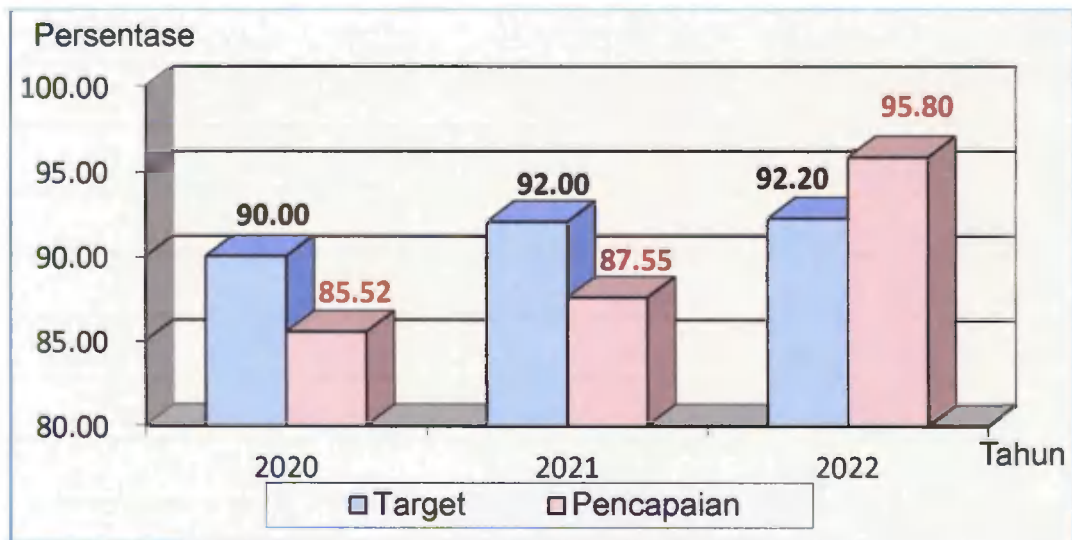
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peserta JKN terdiri dari:

- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 193.631 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 123.888 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 317.519 dari 331.445 orang penduduk Kota Dumai berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) semester I

Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 95.80% dan persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

Grafik 3.21 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2020 – 2022



Tabel 3.8 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai Tahun 2020 – 2022

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan		
		2020	2021	2022
Penerima Bantuan Iuran (PBI)				
1	PBI APBN	74,766	75,857	85.175
2	PBI APBD	84,057	89,238	108.456
Sub Jumlah PBI		158,823	165,095	193.631
Non PBI				
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	82,728	86,623	94.250
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	26,429	26,350	26.479
3	Bukan Pekerja (BP)	702	3,188	3.159
Sub Jumlah Non PBI		109,859	116,161	123.888
Total Peserta Kota Dumai		268,682	281,256	317.519
Jumlah Penduduk Kota Dumai		314,166	321,238	331.445
% JKN di Kota Dumai		85.52	87.55	95.80
% JKN PBI		50.55	51.39	58.42

Berdasarkan jenis kepesertaan JKN, terlihat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 58.42% lebih banyak jumlahnya daripada Non PBI. Hal ini menunjukkan beban Pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Dumai masih besar dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 268.682 orang atau sebesar 85.52%, maka jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 92.2%, maka angka tersebut telah mencapai target Kota Dumai. Pada tahun 2022, BPJS Indonesia telah menetapkan target bahwa kabupaten/kota dinyatakan mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95%. Dengan pencapaian UHC Kota Dumai tersebut, berarti Kota Dumai sudah mencapai UHC. Atas keberhasilan Kota Dumai sudah mencapai UHC, maka pada tanggal 04 Desember 2022 Walikota Dumai dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai mendapat penghargaan dari Gubernur Riau. Meskipun demikian, masih ada sebanyak 4.2% penduduk Kota Dumai yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik sebagai peserta PBI APBN (KIS) sebanyak 85.175 orang atau sebesar

26.82% dan peserta PBI APBD sebanyak 89.238 orang atau sebesar 34.16%, sehingga total penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 193.631 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2022 yakni sebanyak 188.000 orang, maka telah terealisasi sebesar 103% yang artinya telah melebihi target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 165.095 orang, maka jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari pandemi COVID 19 dimana penduduk yang sebelumnya menjadi peserta BPJS secara mandiri (PBPU), karena kehilangan mata pencahariannya menjadi tidak mampu membayar iuran bulanan BPJS yang mengakibatkan banyak peserta BPJS PBPU menunggak. Dengan kebijakan Walikota Dumai yakni mengalihkan kepesertaan peserta BPJS dari PBPU menjadi PBI baik PBI APBN maupun PBI APBD, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan JKN PBI pada tahun 2022.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dimana persentase pencapaian penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebesar 88.24%, terlihat ada peningkatan pencapaian target pada tahun 2022. Sesuai metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Pembangunan Sosial (Bappenas, 2017) proporsi penduduk miskin dan tidak mampu dari total penduduk adalah sebesar 40% yang dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Sejak tahun 2017 pencapaian persentase kepesertaan JKN PBI Kota Dumai sudah melebihi 40% dan angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 persentase kepesertaan JKN PBI Kota Dumai mencapai angka 58.42% yang artinya sudah melampaui target Nasional. Namun kenyataannya masih ada ditemukan penduduk miskin dan tidak mampu Kota Dumai yang masih belum mempunyai jaminan kesehatan.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai khususnya pada tahun 2022, maka telah diimplementasikan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang dijabarkan dalam 5 program, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan) adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memuaskan.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan) adalah sebesar 89.94%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 80%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat memuaskan.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar adalah sebesar 80%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 82%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 97.56% yang berarti pencapaian indikator

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sangat baik.

4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan adalah sebesar 59.83%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 49%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman memuaskan.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator rasio posyandu per 1.000 balita adalah sebesar 4.50 per 1.000 balita. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 4.68 per 1.000 balita, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 96.15% yang berarti pencapaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kesehatan sangat baik.

Kendala

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan keterbatasan alokasi APBD untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2022, keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya. Namun demikian, masalah-masalah kesehatan yang dihadapi terasa semakin kompleks, sehingga kedepannya Dinas Kesehatan mempunyai tugas yang lebih berat dalam melaksanakan upaya-upaya di bidang kesehatan agar tetap mencapai target kinerja.

Adapun kendala-kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kinerja dinas Kesehatan Kota Dumai antara lain adalah :

1. Meskipun pencapaian kinerja Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita memuaskan, namun kecendrungan kasus kematian bayi dan kematian balita menunjukkan peningkatan di Kota Dumai. Di satu sisi kasus kematian ibu menunjukkan penurunan di Kota Dumai. Kematian bayi dan kematian ibu sangat erat keterkaitannya. Sebagian besar kematian bayi diakibatkan kelainan pada kehamilan, lahir prematur dan berat badan lahir rendah, pada saat persalinan, maupun di minggu pertama kehidupan (akibat gangguan pernafasan, infeksi, kongenital, dan lainnya). Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal sebagai dampak pandemi COVID 19, dimana masih ada ibu-ibu yang tidak mau memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke praktek bidan karena takut tertular COVID 19. Isu “tiga terlambat” masih menjadi masalah utama layanan kesehatan maternal, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat mendapat pelayanan yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan.
2. Kota Dumai masih menjadi daerah rawan terjadinya penularan penyakit DBD dan Malaria, karena kota Dumai merupakan daerah dengan mobilisasi penduduk yang sangat tinggi dan daerah endemis DBD dan Malaria. Hal tersebut didukung oleh kondisi kesehatan lingkungan dan sosial budaya penduduk kota Dumai dimana \pm 80% penduduk Kota Dumai dalam memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan bak penampungan air yang potensial sebagai tempat berkembangbiaknya nyamuk vektor Demam Berdarah. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan Malaria dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.
3. HIV-AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang ditemukan saat ini hanya sebagian kecil, belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap HIV-AIDS di masyarakat. Sejak tahun 2006 s/d 2018 Dinas Kesehatan secara kontinyu melakukan surveilans secara aktif melalui layanan VCT (*Voluntary Counseling Testing*)/konseling testing sukarela yang ada di 10 (sepuluh) Puskesmas di Kota Dumai, 1 KKP (Kantor kesehatan pelabuhan) dan RSUD Kota Dumai untuk melakukan penjangkauan dan pemeriksaan/tes HIV

- secara sukarela baik secara mobile maupun statis di masyarakat. Namun sejak tahun 2019 sampai sekarang dengan tidak aktifnya lagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) terkait tidak adanya dukungan dana dari Global Fund dan juga sejak terjadinya pandemic COVID 19 berdampak pada terkendalanya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan HIV pada 8 populasi di Kota Dumai dan juga masyarakat tidak berani memeriksakan sukarela ke fasilitas pelayanan kesehatan karena takut tertular COVID 19. Pada tahun 2022 pencapaian persentase pemeriksaan HIV 8 populasi Kota Dumai sebanyak 7.907 orang atau sebesar 79.35%. Estimasi populasi kunci Kota Dumai dari Kementerian Kesehatan RI sebesar 9.965 orang, yang terdiri dari penderita TBC, penderita Infeksi Menular Seksual (IMS), penaja seks, Lelaki Suka Lelaki (LSL), transgender, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pengguna jarum suntik (penasun) dan ibu hamil. Pada tahun 2022 ada 1 populasi yang tidak dilaksanakan pemeriksaan HIV di Kota Dumai yakni penasun karena sulit melaksanakannya ditambah kurangnya dukungan anggaran.
4. Pandemic COVID 19 juga berdampak pada pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, dimana dari 12 indikator SPM, sebanyak 6 indikator yang pencapaian targetnya kurang dari 90% seperti pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dan pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV). Hal tersebut terkait dengan protocol kesehatan COVID 19 dan perilaku masyarakat yang masih takut berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan karena takut didiagnosa COVID 19.
 5. Permasalahan penduduk pendatang atau illegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau illegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang. Pada umumnya permasalahan kesehatan yang ada banyak merupakan kontribusi

dari penduduk pendatang (illegal) tersebut karena mereka jarang mengakses pelayanan kesehatan dasar karena status mereka yang illegal yang otomatis tidak mempunyai kartu identitas seperti KTP. Berdasarkan data dari puskesmas, selama tahun 2022 ada sebanyak 1.479 orang bukan penduduk Kota Dumai yang mengakses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Penduduk pendatang tersebut terbanyak berdomisili di Kecamatan Dumai Timur (341 orang), Kecamatan Dumai Selatan (277 orang), Kecamatan Dumai Barat (258 orang), Kecamatan Bukit Kapur (237 orang), Kecamatan Dumai Kota (214 orang), Kecamatan Sungai Sembilan (126 orang) dan Kecamatan Medang Kampai (26 orang).

Solusi

1. Penyebab kematian bayi dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan kehamilan salah satunya dengan meningkatkan cakupan kunjungan empat kali pemeriksaan kehamilan (K4) di fasilitas kesehatan. Penyebab kematian ibu sebagian besar dapat dicegah (seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, komplikasi, dan infeksi) apabila cakupan pelayanan disertai mutu pelayanan yang baik. Disamping itu perlu penguatan edukasi ke masyarakat tentang deteksi ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam penanganan kasus ibu hamil dengan resiko tinggi dan komplikasi, peningkatan antenatal care berkualitas dan jaminan kesehatan bagi ibu yang bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta penguatan manajemen kesehatan ibu dan anak.
2. Permasalahan DBD baru bisa teratasi apabila tersedianya sarana dan prasarana sanitasi yang layak juga tersedianya sarana air bersih yang layak dan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh seluruh masyarakat. Permasalahan DBD tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan sendiri, tapi memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan OPD terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.
3. Permasalahan HIV/AIDS memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Komisi Penanggulangan AIDS dan pihak swasta (pengusaha karaoke, salon dan

- panti pijat). Sering terjadi petugas kesehatan mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan (skrining) HIV pada hotspot tersebut (karaoke, salon dan panti pijat) sehingga dukungan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar petugas kesehatan dapat mengakses hotspot dimaksud. Lebih lanjut Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus diaktifkan kembali dan mengupayakan biaya operasionalnya melalui dana Hibah Pemerintah Kota Dumai melalui pengajuan proposal ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai.
4. Permasalahan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan yang belum mencapai target sebagai dampak pandemic COVID 19 diatasi dengan merubah strategi pelayanan, yang sebelumnya merupakan pelayanan dalam gedung (per individu di poli pelayanan puskesmas), dengan telah melandainya kasus COVID 19 dan telah mulai normalnya aktifitas kehidupan di masyarakat maka pelayanan luar gedung mulai diaktifkan kembali seperti di posyandu, posbindu, sekolah dan kunjungan rumah (home visit).
 5. Permasalahan penduduk pendatang atau illegal sejak lama belum ada solusinya sampai sekarang. Kolaborasi dan koordinasi antar Dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak kelurahan beserta Rt/Rw dalam mengawasi dan mengontrol penduduk pendatang atau penduduk tanpa KTP sangat diperlukan. Demikian juga dukungan dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan razia KTP secara kontinyu sangat diperlukan. Mungkin diperlukan strategi baru untuk menjangkau penduduk Kota Dumai yang tidak memiliki KTP melalui pelayanan KTP mobile oleh dinas terkait.

b. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 alokasi Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 138.682.633.959,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 127,193,095,752.90 atau 91.72%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 119.879.933.979,00 (86.44%) dan untuk UPT BLUD Dinas Kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp

18,802,699,980.00 (13.56%). Anggaran Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan dialokasikan ke dalam 5 program (terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan dan 4 urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan), dan 22 kegiatan (terdiri dari 9 kegiatan penunjang urusan pemerintahan dan 13 kegiatan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		72,844,357,296.00	64,776,057,046.00	88.92
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	72,844,357,296.00	64,776,057,046.00	88.92
1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	74,390,344.00	57,083,300.00	76.73
2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	50,999,420,193.00	44,290,958,598.00	86.85
3	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	28,400,000.00	26,900,000.00	94.72
4	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	309,096,432.00	270,289,500.00	87.44
5	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1,275,046,023.00	1,228,843,380.00	96.38
6	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	396,479,448.00	383,250,000.00	96.66
7	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3,089,823,700.00	2,828,394,779.00	91.54
8	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	949,906,296.00	848,237,805.00	89.30
9	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	15,721,794,860.00	14,842,119,684.00	94.40

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG KESEHATAN	65,838,276,663.00	62,417,038,706.90	94.80
i	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64,516,202,782.00	61,179,113,724.90	94.83
1	Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten Kota	18,735,607,261.00	17,910,867,176.90	95.60
2	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	35,526,179,097.00	33,542,745,254.00	94.42
3	Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	252,940,556.00	192,989,068.00	76.30
4	Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	10,001,475,868.00	9,532,512,226.00	95.31
ii	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	71,583,400.00	70,350,000.00	98.28
1	Kegiatan pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kota	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00
2	Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	49,083,400.00	47,850,000.00	97.49
iii	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	970,681,481.00	903,894,982.00	93.12
1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	76,977,000.00	68,365,000.00	88.81
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152,423,309.00	146,587,750.00	96.17
3	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	254,053,756.00	248,120,342.00	97.66
4	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	164,112,936.00	161,070,390.00	98.15
5	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	323,114,480.00	279,751,500.00	86.58
iv	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	279,809,000.00	263,680,000.00	94.24
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193,029,200.00	180,165,000.00	93.34
2	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86,779,800.00	83,515,000.00	96.24
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI		138,682,633,959.00	127,193,095,752.90	91.72

Dari total Rp 119.879.933.979,00 anggaran untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai telah terealisasi sebesar Rp 110.043.037.263,90 atau dengan persentase capaian sebesar 91.79%. Anggaran Dinas Kesehatan terdiri dari anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp 57,122,562,436.00

(47.65%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 49,933,937,362.00 atau 87.42% dan anggaran urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan sebesar Rp 62,757,371,543.00 (52.35%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 60,109,099,901.90 atau 95.78%.

Dari 5 program, hanya program penunjang urusan pemerintahan yang persentase penyerapannya di bawah 90% yakni sebesar 87.42%. Sementara untuk persentase pencapaian 4 program urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan penyerapannya di atas 90%. Belum optimalnya penyerapan anggaran program penunjang urusan pemerintahan karena ada beberapa uraian kegiatan yang tidak terealisasi seperti pertemuan musrenbang Dinas Kesehatan dan pertemuan evaluasi pelaksanaan program pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, belanja gaji dan tunjangan tahun 2022 untuk tenaga P3K pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, belanja honorarium tim penilai adminkes yang dibentuk dipertengahan tahun dan penyuluh kesehatan yang belum dibentuk dan belanja diklat teknis yang tidak terlaksana sebanyak 3 kuota pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sisa pagu dari jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta sisa pagu kegiatan lainnya. Sementara itu, penyerapan anggaran yang belum optimal pada program urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan, antara lain: adanya sisa pagu dari pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota. Tidak terealisasinya belanja makan minum di RTK karena jumlah pasien yang tidak memenuhi target serta transport rujukan ke fasilitas kesehatan tersier, tidak terealisasinya anggaran KIPI karena selama dilaksanakan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2022 tidak ada kasus KIPI dan tidak terealisasinya anggaran perjalanan dinas luar Kota untuk penjemputan vaksin karena penjemputan Vaksin Covid-19 dan logistik dilaksanakan oleh Provinsi, tidak terealisasinya anggaran pengiriman sampel sebagai akibat adanya penurunan kasus covid-19 sejak bulan Mei 2022 menyebabkan tidak ada kegiatan tracing dan pengambilan sampel swab, tidak terealisasinya anggaran penyelidikan epidemiologi KIPI COVID 19 sebagai akibat tidak ada laporan kasus KIPI setelah vaksinasi COVID

19 pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Bahkan ada sub kegiatan yang tidak terealisasi sama sekali karena belum terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan tentang Revisi Standar Akreditasi dan Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Tahun 2022 sehingga sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan. Demikian juga sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga tidak terealisasi karena belum optimalnya bridging aplikasi SIDARBIN dengan PIS-PK. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana yakni pertemuan validasi data profil dan pertemuan ASPAK, serta adanya sisa pagu pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi. Adanya anggaran bersumber DAK Non Fisik BPOM untuk kegiatan UMOT tidak realisasi karena pelaku usaha tidak lagi produksi UMOT pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan
Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	57,122,562,436.00	49,933,937,362.00	87.42
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>57,122,562,436.00</i>	<i>49,933,937,362.00</i>	<i>87.42</i>
1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	74,390,344.00	57,083,300.00	76.73
2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	50,999,420,193.00	44,290,958,598.00	86.85
3	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	28,400,000.00	26,900,000.00	94.72
4	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	309,096,432.00	270,269,500.00	87.44
5	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1,275,046,023.00	1,228,843,380.00	96.38
6	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	396,479,448.00	383,250,000.00	96.66
7	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3,089,823,700.00	2,828,394,779.00	91.54
8	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	949,906,296.00	848,237,805.00	89.30

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG KESEHATAN	62,757,371,543.00	60,109,099,901.90	95.78
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61,435,297,662.00	58,871,174,919.90	95.83
1	Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten Kota	18,735,607,261.00	17,910,867,176.90	95.60
2	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	32,445,273,977.00	31,234,806,449.00	96.27
3	Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	252,940,556.00	192,989,068.00	76.30
4	Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	10,001,475,868.00	9,532,512,226.00	95.31
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	71,583,400.00	70,350,000.00	98.28
1	Kegiatan pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kota	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00
2	Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	49,083,400.00	47,850,000.00	97.49
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	970,681,481.00	903,894,982.00	93.12
1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	76,977,000.00	68,365,000.00	88.81
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152,423,309.00	146,587,750.00	96.17
3	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	254,053,756.00	248,120,342.00	97.66
4	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	184,112,936.00	161,070,390.00	98.15
5	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	323,114,480.00	279,751,500.00	86.58
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	279,809,000.00	263,680,000.00	94.24
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193,029,200.00	180,165,000.00	93.34
2	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86,779,800.00	83,515,000.00	96.24
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI		119,879,933,979.00	110,043,037,263.90	91.79

Sedangkan dari total Rp 18,802,699,980.00 anggaran untuk UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A telah terealisasi

sebesar Rp 17,150,058,489.00 atau dengan persentase capaian sebesar 91.21%. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan uraian UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Uraian UPT
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		15,721,794,860.00	14,842,119,684.00	94.40
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	15,721,794,860.00	14,842,119,684.00	94.40
	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	15,721,794,860.00	14,842,119,684.00	94.40
	<i>BLUD Puskesmas Dumai Kota</i>	2,017,230,500.00	1,782,412,486.00	88.36
	<i>BLUD Puskesmas Dumai Barat</i>	1,143,800,000.00	1,115,569,848.00	97.53
	<i>BLUD Puskesmas Bukit Kapur</i>	1,536,000,000.00	1,508,888,994.00	98.23
	<i>BLUD Puskesmas Sungai Sembilan</i>	2,454,374,960.00	2,427,951,523.00	98.92
	<i>BLUD Puskesmas Medang Kampai</i>	961,450,000.00	914,879,826.00	95.16
	<i>BLUD Puskesmas Bumi Ayu</i>	1,105,404,000.00	1,104,626,908.00	99.93
	<i>BLUD Puskesmas Bukit Timah</i>	657,000,000.00	657,649,344.00	100.10
	<i>BLUD Puskesmas Jaya Mukti</i>	2,459,545,000.00	2,206,932,354.00	89.73
	<i>BLUD Puskesmas Pumama</i>	1,202,642,000.00	1,202,180,550.00	99.96
	<i>BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur</i>	1,985,838,650.00	1,744,616,823.00	87.85
	<i>BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A</i>	198,509,750.00	176,411,028.00	88.87
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG KESEHATAN		3,080,905,120.00	2,307,938,805.00	74.91
1	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	3,080,905,120.00	2,307,938,805.00	74.91
1	Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten Kota	3,080,905,120.00	2,307,938,805.00	74.91
	<i>Puskesmas Dumai Kota</i>	373,000,000.00	351,862,008.00	94.33
	<i>Puskesmas Dumai Barat</i>	226,400,000.00	160,081,265.00	70.71
	<i>Puskesmas Bukit Kapur</i>	238,973,120.00	131,525,532.00	55.04
	<i>Puskesmas Sungai Sembilan</i>	465,000,000.00	393,008,110.00	84.52
	<i>Puskesmas Medang Kampai</i>	239,950,000.00	161,758,270.00	67.41
	<i>Puskesmas Bumi Ayu</i>	330,100,000.00	251,088,578.00	76.06
	<i>Puskesmas Bukit Timah</i>	240,162,000.00	225,657,732.00	93.96
	<i>Puskesmas Jaya Mukti</i>	431,920,000.00	239,453,538.00	55.44
	<i>Puskesmas Pumama</i>	252,900,000.00	199,092,579.00	78.72
	<i>Puskesmas Bukit Kayu Kapur</i>	282,500,000.00	194,411,193.00	68.82
UPT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI		18,802,699,980.00	17,150,058,489.00	91.21

Dari tabel di atas menunjukkan penyerapan anggaran pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota yang bersumber APBN yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang kesehatan hanya terserap sebesar 74.91%. Persentase penyerapan DAK Non Fisik di Puskesmas bervariasi dengan penyerapan tertinggi sebesar 94.33% di Puskesmas Dumai Kota dan penyerapan terendah sebesar 55.04% di Puskesmas Bukit Kapur. Tidak optimalnya penyerapan DAK Non Fisik di Puskesmas karena adanya perubahan regulasi di Kementerian Kesehatan yakni adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang baru ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2022.

Berdasarkan sumber anggaran, APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 bersumber dari berbagai sumber antara lain APBD Provinsi Riau (Bantuan Keuangan), APBN (DAK Fisik dan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan) dan BLUD, dengan alokasi pagu dan realisasi seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Sumber Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

No.	Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	APBD Kota Dumai	108,160,279,602.00	99,752,942,327.90	92.23
2.	APBD Provinsi Riau (Bantuan Keuangan)	636,789,600.00	618,250,000.00	97.09
3.	APBN (DAK Fisik dan & Non Fisik Kesehatan)	14,163,769,897.00	11,979,783,741.00	84.58
4.	BLUD	15,721,794,860.00	14,842,119,684.00	94.40
	TOTAL	138,682,633,959.00	127,193,095,752.90	91.72

Sedangkan berdasarkan unit kerja, terdiri dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 119.879.933.979,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 110.043.037.263,90 atau 91.79%, anggaran puskesmas (10 puskesmas) sebesar Rp 18,604,190,230.00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 16,973,647,461.00 atau 91.24%, dan anggaran Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 198.509.750,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 176.411.028,00 atau 88.87%. Dari 12 unit kerja, ada sebanyak 4 puskesmas yang realisasi anggarannya di bawah 90% yakni Puskesmas Dumai Kota, Puskesmas Medang Kampai, Puskesmas

Jaya Mukti dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan unit kerja tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 3.13
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Kesehatan Kota Dumai	119,879,933,979.00	110,043,037,263.90	91.79
2	BLUD Puskesmas Dumai Kota	2,390,230,500.00	2,134,274,494.00	89.29
3	BLUD Puskesmas Dumai Barat	1,370,200,000.00	1,275,651,113.00	93.10
4	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1,774,973,120.00	1,640,414,526.00	92.42
5	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2,919,374,960.00	2,820,959,633.00	96.63
6	BLUD Puskesmas Medang Kampai	1,201,400,000.00	1,076,638,096.00	89.62
7	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1,435,504,000.00	1,355,715,486.00	94.44
8	BLUD Puskesmas Bukit Timah	897,162,000.00	883,307,076.00	98.46
9	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	2,891,465,000.00	2,446,385,892.00	84.61
10	BLUD Puskesmas Purnama	1,455,542,000.00	1,401,273,129.00	96.27
11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	2,268,338,650.00	1,939,028,016.00	85.48
12	BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	198,509,750.00	176,411,028.00	88.87
TOTAL		138,682,633,959.00	127,193,095,752.90	91.72

Sehingga efisiensi kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2022 menunjukkan 3.20% atau Rp 11,489,538,206.10 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
EFISIENSI KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Program Wajib	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)	
									Rp	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7-11	
Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Berkumpu pada Budaya Melayu Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjiwa Diri Melayu												
	Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	0.785	0.771	98.22						
	Sasaran Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.10	71.25	100.00						
		Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	92.2	95.80	100.00						
	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)											
		1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	100	100.00						
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17.5	9.96	100	1 Program Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.844.357,296.00	64.776.057,046.00	88.92		
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24.5	11.13	100						
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101.5	58.56	100	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.516.202,782.00	61.179.113,724.90	94.83		
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71.10	71.25	100.00						
		2. Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	100	88.02	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	71.583.400.00	70.350.000.00	98.28		
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.9	0.02	100						
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Pendenta TB Paru BTA +	%	88	41.42	47.07	4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Miruman	970.681,481.00	903.884,882.00	93.12		
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	1	0.16	100						
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah (DBD)	per 100.000 penduduk	55	56.64	97.02	5 Program Pembedayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	279.609.000.00	263.680.000.00	94.24		
		3. Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100						
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0.12	100						
		3.2 Persentase Balita Dengan Gizi Kurang	%	3	0.69	100						
		4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92.2	95.80	100.00						
Capaian Rata-Rata								TOTAL	138.882,633,969.00	127.193,095,752.90	91.72	3.20

No	Tahun	Nama Penghargaan	Tingkat
8	2021	Puskesmas dengan Indeks Keluarga Sehat Tertinggi tingkat Provinsi dari Kementerian Kesehatan RI (Puskesmas Bukit Kapur)	Provinsi Riau
9	2021	Puskesmas dengan Indeks Keluarga Sehat Tertinggi tingkat Provinsi dari Kementerian Kesehatan RI (Puskesmas Bukit Kayu Kapur)	Provinsi Riau
10	2021	Puskesmas dengan Indeks Keluarga Sehat Tertinggi tingkat Provinsi dari Kementerian Kesehatan RI (Puskesmas Jaya Mukti)	Provinsi Riau
11	2022	Kabupaten/Kota Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan RI	Nasional
12	2022	Pencapaian SPM HIV, Test and Treat di dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Riau	Provinsi Riau
13	2022	Evaluasi Implementasi SAKIP terbaik Kota Dumai tahun 2022	Kota Dumai
14	2022	Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta/ Universal Health Coverage (UHC) kepada Walikota Dumai dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai dari Gubernur Riau	Provinsi Riau



B A B I V
P E N U T U P

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perencanaan Strategis, Dinas Kesehatan telah melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi pembangunan kesehatan Kota Dumai dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai.


Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), ada sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya memuaskan (tercapai 100%), dan sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya sangat baik. Namun, masih ada sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya kurang yakni Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya kurang tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai pasca pandemik COVID 19. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Dumai cukup berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 94.92% (kategori nilai sangat baik). Dengan demikian, secara umum Dinas Kesehatan telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan itu sendiri adalah proses yang panjang dan bersifat investasi, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat sehat, kreatif dan produktif dalam lingkungan dan perilaku sehat. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan akan selalu membutuhkan perhatian besar dari seluruh kalangan, baik pemerintah sendiri maupun masyarakat sebagai subyek dan objek pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI**

**Dr. SYAIFUL, MKM
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 197107242001121004**



LAMPIRAN LKJ-IP
DINKES DAN UPT

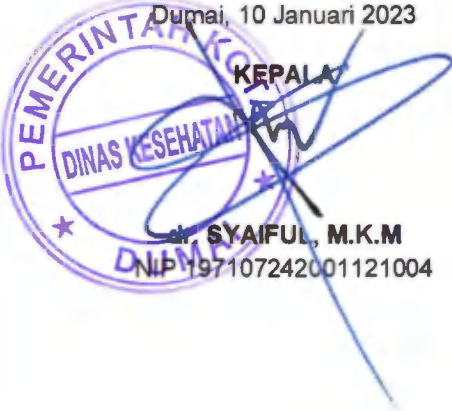
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022-2026
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

No.	Indikator	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	18	17.5	17	16.5	16
2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	25	24.5	24	23.5	23
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	102	101.5	101	100.5	100
4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,04	71.10	71.15	71.20	71.25
5	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	1	0.9	0.8	0.7	0.6
6	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	88	88	88	88
7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	55	55	54	54
9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	1	1	1	1
10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	3	3	2	2
11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92	92.2	92.4	92.6	92.8

Sumber: Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Dumai, 10 Januari 2023

KEPALA



dr. SYAIFUL, M.K.M
NIP. 197107242001121004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI

dr. SYAIFUL, MKM

Nip. 19710724 200112 1001

Pihak Kedua,
WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAMJUN 2022
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahunan 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785
		1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,10
		1.1 Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kematian Hidup	17,5
		1.2 Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kematian Hidup	24,5
		1.3 Angka Kematian Ibu	Per 1.000 Kematian Hidup	101,6
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,10
		1.6 Angka Kesakitan Maternal (AP1)	Per 1.000 Kematian Hidup	0,9
		1.7 Persentase Angka Kecelakaan Penderita TB Paru BTA +	%	68
		1.8 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	<1
		1.9 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 Kematian Hidup	55
		1.10 Persentase Balita dengan Cid Kurang	%	1
1.11 Persentase Balita dengan Cid Buruk	%	3		
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	92,2

1 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	61.878.413.182
2 Sasaran 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	71.583.400
	3 Program Sedasi Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp	970.681.481
	4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	279.809.000
	Jumlah	Rp	63.201.487.063



**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1	2	3	4	5
		Indeks Kesehatan	Indeks	0,785
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,10
		1,1 Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	17,5
		1,2 Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	24,5
		1,3 Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	101,5
		1,4 Umur Harapan hidup	Tahun	71,10
		1,6 Angka Kesakitan Malaria (API)	Per 1.000 Penduduk	0,9
		1,7 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		1,8 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	<1
		1,9 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 Penduduk	55
		1,10 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	1
		1,11 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92,2

Dumai, 03 Oktober 2022

Pihak Pertama
KEPALA

dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004



**PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
ESSELON II
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
				Tahunan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.10				71.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	72,844,357,296
	Kesehatan Masyarakat	1.1 Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	17.5	4.38	4.38	4.38	4.38				
		1.2 Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	24.5	6.13	6.13	6.13	6.13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	80%	63,879,413,182
		1.3 Angka Kematian Ibu	Per 1.000 Kelahiran Hidup	101.5	25.38	25.38	25.38	25.38				
		1.4 Umur Harapan hidup	Tahun	71.10				71.10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar	82%	71,583,400
		1.6 Angka Kesakitan Malaria (API)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9				
		1.7 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	22	20	24	22	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan peraturan	49%	970,681,481
		1.8 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	<1	<1	<1	<1	<1				
		1.9 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	55	< 55	< 55	< 55	< 55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	4,68%	279,809,000
		1.10 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	1	0.25	0.25	0.25	0.25				
		1.11 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3	0.75	0.75	0.75	0.75				
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	92.2	87	2	1	2.2				
											Jumlah	138,045,844,359





SERTIFIKAT
KABUPATEN/KOTA BEBAS FRAMBUSIA

Diberikan Kepada

KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

16 Februari 2022
Menteri Kesehatan



Budi G. Sadikin



Kantor
Penanggulangan
AIDS
Provinsi Riau



Piagam Penghargaan

diberikan kepada:

DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Atas Pencapaian SPM HIV, Test and Treat didalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS
di Provinsi Riau

Pekanbaru, 17 November 2022
Wakil Gubernur Riau
Selaku Ketua Pelaksana KPAP Riau

Brigjen TNI (Purn) H. EDY NATAR NST, SIP



GUBERNUR RIAU

PIAGAM

335/DINKES/2022

PENGHARGAAN

PENCAPAIAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA/
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)

(95,71%)

TMT 04 Desember 2022

Diberikan kepada :

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

dr. SYAIFUL, M.K.M

Pekanbaru, 04 Desember 2022

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR



GUBERNUR RIAU

PIAGAM

335/DINKES/2022

PENGHARGAAN

PENCAPAIAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA/
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)

(95,71%)

TMT 04 Desember 2022

Diberikan kepada :

WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM. MARS

Pekanbaru, 04 Desember 2022

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Diagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

Dinas Kesehatan

Atas prestasinya dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kluster Utama
di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 pada PERINGKAT PERTAMA



dengan KATEGORI "A"

Dumai, Desember 2022
Wali Kota Dumai,

H. PAISAL, SKM, MARS

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

